

SKRIPSI

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA SELURUH DESA DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)



Oleh :

**JULINDA SARI
160412024**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Alla SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang amat besar kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan sebagai Dosen pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya dalam membimbing peneliti
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak M. Irwan, SE., MM selaku pembimbing I yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.
5. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Kepala Desa beserta Perangkat Desa di Kecamatan Benai yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, Ayahanda Amir Hamzah dan Ibunda Sumiati serta Adikku Rozi Ardinsyah dan Rizky Ananda yang selalu memberikan do'a serta pengorbanan yang tiada henti, semangat, dan juga kasih sayang kepada peneliti.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan bantuan dan masukan dalam penelitian ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti, bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini.

Teluk Kuantan, 05 Juli 2020

Peneliti

Julinda Sari
160412024

ABSTRAK

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi).

Julinda Sari
M. Irwan
Zul Ammar

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa di Kecamatan Benai. Data penelitian ini diperoleh dari data kuesioner (primer). Populasi dalam penelitian ini yaitu perangkat Desa yang ada di Kecamatan Benai yang berjumlah 15 Desa dengan total populasi adalah 299 orang. Metode pengambilan sampel *purposive sampling* diperoleh 90 sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan uji t dan koefisien determinasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa, pertama pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,596. Kedua, kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,350. Ketiga, kelembagaan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,964. Diperoleh Koefisiensi Determinasi sebesar 0,397 atau sama dengan 39,7% yang artinya besarnya akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat adalah 39,7% sedangkan 60,3% sisanya yaitu dijelaskan oleh penyebab lainnya yang berasal dari luar regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa, Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

The Effect of Accountability on Village Funds Financial Management, Village Policy and Village Institutions on Community Welfare (Case Study of Villages in Benai District, Kuantan Singingi District).

Julinda Sari
M. Irwan
Zul Ammar

This study aims to examine the influence of financial management of village fund allocation, village policies and village institutions on community welfare in villages in Benai District. The research data was obtained from questionnaire data (primary). The population in this study is the Village apparatus in Benai District, amounting to 15 villages with a total population of 299 people. The method of taking purposive sampling obtained 90 samples. This study uses a quantitative approach. The analysis used is multiple linear regression analysis, with t test and coefficient of determination.

The test results show that, firstly the influence of accountability in financial management of village fund allocations has a significant effect on people's welfare by 0.596. Second, village policies have a significant effect on people's welfare by 0.350. Third, village institutions have a significant effect on community welfare by 0.964. Determination coefficient obtained by 0.397 or equal to 39.7% which means the amount of financial management accountability of village fund allocation, village policies and village institutions to the welfare of the community is 39.7% while the remaining 60.3% is explained by other causes originating from outside regressions that were not examined in this study.

Keywords: *Accountability of Village Fund Allocation Financial Management, Village Policy, Village Institutions, Community Welfare.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Peneitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Desa.....	13
2.1.2 Pemerintahan Desa	14
2.1.3 Alokasi Dana Desa.....	19
2.1.4 Definisi Keuangan Desa	26
2.1.4.1 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	27
2.1.4.2 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	27
2.1.5 Akuntabilitas.....	30

2.1.6 Good Governance.....	33
2.1.6.1 Prinsip-Prinsip Good Governance	33
2.1.7 Kebijakan Desa.....	34
2.1.7.1 Bentuk-Bentuk Kebijakan Desa	36
2.1.7.2 Indikator Kebijakan Desa	37
2.1.8 Kelembagaan Desa	38
2.1.8.1 Jenis-Jenis Kelembagaan Desa	38
2.1.8.2 Kedudukan Kelembagaan Desa.....	40
2.1.8.3 Indikator Kelembagaan Desa	43
2.1.9 Kesejahteraan Masyarakat.....	44
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	47
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	52
2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi.....	52
Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	52
2.3.2 Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat...	53
2.3.3 Pengaruh Kelembagaan Desa terhadap	54
Kesejahteraan Masyarakat.....	54
2.4 Kerangka Penelitian	55
2.5 Hipotesis Penelitian.....	56
 BAB III METODE PENELITIAN	 57
3.1 Rancangan Penelitian.....	57
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	58
3.2.1 Tempat Penelitian.....	58
3.2.2 Waktu Penelitian	58
3.3 Populasi dan Sampel.....	59
3.3.1 Populasi	59
3.3.1 Sampel.....	60
3.4 Jenis dan Sumber Data	61

3.4.1 Jenis Penelitian	61
3.4.2 Sumber Penelitian	61
3.5 Teknik Pengumpulan Data	62
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	62
3.6.1 Variabel Penelitian	62
3.6.2 Definisi Operasional.....	64
3.7 Instrumen Penelitian	67
3.8 Analisis Data	67
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	67
3.8.2 Uji Kualitas Data	68
3.8.3 Uji Asumsi Klasik	69
3.8.4 Uji Hipotesis	70
3.8.5 Uji Secara Parsial (Uji t).....	71
3.8.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	74
4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Benai	74
4.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Benai	76
4.1.3 Keadaan Penduduk	77
4.1.4 Pendidikan.....	77
4.1.5 Kesehatan	78
4.1.6 Agama	79
4.2 Deskripsi Responden	79
4.3 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	83
4.3.1 Variabel Akuntabilitas Pengelolaan ADD	83
4.3.2 Variabel Kebijakan Desa.....	89
4.3.3 Variabel Kelembagaan Desa	94

4.3.4 Variabel Kesejahteraan Masyarakat.....	96
4.4 Uji Kualitas Data	103
4.4.1 Uji Validitas.....	103
4.4.2 Uji Reabilitas	105
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	106
4.5.1 Uji Normalitas	106
4.5.2 Uji Multikolineritas	107
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	107
4.5.4 Uji Autokorelasi	109
4.6 Analisis Regresi Liner Berganda	110
4.6.1 Persamaan Regresi	110
4.7 Uji Hipotesis	112
4.8 Koefisien Determinasi	114
4.9 Pembahasan Hasil Penelitian	116
BAB V PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan.....	122
5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Penduduk Miskin Kecamatan Benai	3
2.1 Penelitian Terdahulu	47
3.1 Rincian Jadwal Penelitian	58
3.2 Populasi Penelitian	59
3.3 Sampel Penelitian	60
3.4 Definisi Operasional	65
4.1 Luas Wilayah di Desa Kecamatan Benai	75
4.2 Deskriptif Kuisisioner	80
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	80
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	81
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	82
4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Masa Kerja	82
4.7 Tanggapan Responden Terhadap Variabel X_1	85
4.8 Tanggapan Responden Terhadap Variabel X_2	91
4.9 Tanggapan Responden Terhadap Variabel X_3	94
4.10 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Y	98
4.11 Uji Validitas	103
4.12 Hasil Uji Reabilitas	105
4.13 Uji Multikolineritas	107
4.14 Uji Autokorelasi	109
4.15 Uji Koefisien Regresi Berganda	110
4.16 Nilai Koefisien t	112
4.17 Uji t	113
4.18 Nilai Koefisien Determinasi	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	55
4.1 Struktur Organisasi.....	76
4.1 Uji Normalitas.....	106
4.2 Grafik Histogram.....	106
4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
LAMPIRAN 1 Kuesioner Penelitian.....	127
LAMPIRAN 2 Tabulasi Data Penelitian.....	136
LAMPIRAN 3 Hasil Statistik Deskriptif.....	151
LAMPIRAN 4 Hasil Uji Validitas.....	154
LAMPIRAN 5 Hasil Uji Reliabilitas.....	164
LAMPIRAN 6 Hasil Uji Hipotesis.....	167
LAMPIRAN 7 T Tabel.....	169
LAMPIRAN 8 R Tabel.....	172
LAMPIRAN 9 Surat Balasan Riset.....	
LAMPIRAN 10 Bukti Penyebaran Kuesioner.....	
LAMPIRAN 11 Kartu Bimbingan.....	
LAMPIRAN 12 Biodata.....	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. dalam perkembangannya, desa telah menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan “Desa adalah desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapainya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.

Dalam istilah umum, kesejahteraan menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusianya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Kesejahteraan dapat diukur dari segi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik (Widyastuti, 2012). pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan

pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin,2012).

Dalam mewujudkan tujuan perekonomian desa yang berhasil, maka setiap desa di Indonesia telah diberikan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya oleh pemerintah, guna melaksanakan pengembangan dan pembangunan pada desa. Untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa melalui dana Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah Desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari letak geografis desa, jumlah penduduk, Luas wilayah dan jumlah kemiskinan.

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan kesejahteraan karena sebuah kondisi dimana seseorang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti tempat tinggal, sandang, pangan, kesehatan yang layak serta juga pendidikan sehingga mereka dikatakan tidak sejahtera.

Penelitian ini dilakukan pada desa Kecamatan Benai karena terdapat permasalahan kemiskinan yang dilihat dari keluarga miskin (KM) yang menerima

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penduduk Miskin di Desa Kecamatan Benai Berdasarkan Bantuan
Program Keluarga Harapan (PKH) Per 5 Tahun 2015-2019

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah Km ²	Jumlah Penduduk Miskin Per 5 Tahun
				2015-2019 (KK)
1	Kota Benai	360	1,76	19
2	Talontam	962	1,85	40
3	Banjar Benai	3.536	19,62	48
4	Gunung Kesiangan	639	25,99	58
5	Banjar Lopak	664	5,15	61
6	Pulau Kalimantaning	460	21,93	50
7	Tanjung Simandolak	486	2,00	41
8	Pulau Ingu	1.409	10,00	98
9	Koto Simandolak	1.548	10,10	71
10	Tebing Tinggi	1.636	5,47	64
11	Pulau Lancang	572	4,47	35
12	Pulau Tongah	636	2,72	50
13	Ujung Tanjung	378	2,86	48
14	Pulau Bungin	968	4,64	69
15	Benai Kecil	584	2,60	21
	Total	14.838	121,16	793

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas data kesejahteraan masyarakat dilihat dari data Program Keluarga Harapan (PKH). Program keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. dapat dilihat jumlah masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Benai mencapai 793 KK. desa yang memiliki Kemiskinan terbesar adalah Desa Pulau Ingu dengan kemiskinan mencapai 98 KK dengan jumlah Penduduk 1.409 Jiwa dan Luas Wilayah 10,00 Km². sedangkan desa yang

memiliki kemiskinan terendah adalah Desa Koto Benai dengan kemiskinan sebesar 19 KK dengan jumlah Penduduk 360 Jiwa dan Luas Wilayah 1,76 km². Program PKH ini bertujuan sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan serta mencapai kesejahteraan.

Sehubungan dengan hal ini maka pemerintah memberikan bantuan keuangan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang outputnya pada kesejahteraan masyarakat desa. bantuan keuangan tersebut berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Pada tahun 2016, alokasi dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 46,98 Triliyun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 628 juta. Sementara Tahun 2017 alokasi dana desa meningkat menjadi 60 triliyun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 800 juta. Penyaluran dan realisasi penyerapan alokasi dana desa tahun 2017 terbagi kedalam 2 tahap. Realisasi penyaluran untuk tahap pertama sebesar Rp. 35,8 triliyun dan hanya tersalurkan 99,5% dari pagu tahap pertama yaitu sebesar Rp. 36 triliyun untuk 434 daerah (100%) yang terdiri dari 74.910 desa. Realisasi penyaluran untuk tahap kedua sebesar Rp. 11,85 triliyun atau hanya 49,3% dari pagu tahap kedua sebesar Rp. 24 triliyun untuk 209 daerah dari 434 daerah (48,2%) dan 36.503 desa dari 74.810 desa (48,7%). Realisasi penyaluran alokasi dana desa semuanya hanya sebesar Rp. 47,65 triliyun dari penyaluran alokasi dana desa yang awalnya 60 triliyun. (www.kemenkeu.go.id).

Namun, walaupun Program Keluarga Harapan (PKH) telah dijalankan di Kecamatan Benai ternyata program ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, seperti dikutip dari [jurnal media indonesia.com](http://jurnal.media.indonesia.com) pada tanggal 14 juni 2020, disalah

satu desa di Kecamatan Benai yaitu Desa Kalimanting dana PKH diduga dikurangi jumlah penerimanya, entah apa yang menjadi alasannya padahal kalau dilihat perekonomian masyarakatnya sangat jauh dari berkecukupan, tetapi itulah yang dihadapi masyarakat Desa Tanjung Simandolak dan Desa Pulau Kalimanting Siberakun Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Belum lagi permasalahan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD), Desa Pulau Kalimanting yang berpenduduk kurang lebih 120 KK ini juga mengeluh atas sikap dan cara kerja Kepala Desa mereka. Proyek-proyek pembangunan di desa pulau Kalimanting yang anggarannya dari anggaran dana desa juga diduga dimonopoli oleh Kepala Desa dan dapat dilihat dari pembangunan jalan semenisasi yang tidak sesuai dengan SOP yang diajukan, dikutip dari [Jurnal Media Indonesia.com](http://JurnalMediaIndonesia.com).

Di kabupaten Kuantan Singingi diketahui pada struktur dana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) tahun 2017 memiliki pendapatan sebesar Rp. 1,374 triliun. dana tersebut sudah termasuk pendapatan asli daerah kabupaten kuantan singingi, dana perimbangan pemerintah pusat dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Dalam APBD tersebut jumlah alokasi dana desa yang diperuntukan oleh pemerintah pusat untuk kabupaten kuantan singingi adalah Rp. 166 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp. 36 milyar dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 130 milyar. Dana tersebut diperuntukan bagi 218 desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi termasuk salah satunya adalah desa yang ada dikecamatan benai. sesuai dengan prosedur yang telah dilaksanakan sebelumnya alokasi dana desa tersebut penyalurannya langsung ke rekening desa masing-masing (www.kuansingterkini.com).

Dengan adanya bantuan Pemerintah dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa. Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan

desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mencapai tujuan sebuah desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. dimana salah satu karakteristik dan unsur utama dari Good Governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Oleh karena akuntabilitas sangat diperlukan menunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.

Kecamatan Benai merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 121,16 km². Kecamatan Benai dipimpin oleh seorang Camat. Pemerintah tidak berjalan sendiri dalam mengemban tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Pembangunan masyarakat desa di arahkan untuk dimanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Pemerintah Desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa. pemerintah diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi membangun indonesia haruslah dimulai dari desa, karena desa

menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. oleh karena itu kelembagaan desa harus bekerja secara sinergis dan terpadu untuk mencapai desa yang sejahtera. Pemerintah desa merupakan pemerintah paling bawah yang berhubungan dengan masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan pemerintah desa sangat dibutuhkan.

Untuk itu perlunya kebijakan dari pemerintah desa. Kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa program dan peraturan. kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila didukung oleh faktor yaitu ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan kebutuhan publik serta didorong oleh dukungan responsibilitas masyarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah termasuk taat kepada hukum dan peraturan (Tachjan, 2006). Pemerintah desa secara formal memiliki wewenang dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara positif dalam bentuk peraturan desa, namun terlepas dari sudut pandang formalitas, setiap desa secara tradisional memiliki kearifan lokal dalam setiap penyelesaian masalah desa.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan desa perlu adanya Lembaga untuk wadah mengemban tugas dan fungsi tertentu. oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa. tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan

pelayanan (*Service*) dan pemberdayaan (*empowerment*), serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Didalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi-organisasi lainnya. dalam menyelenggarakan pembangunan desa, desa mendayagunakan lembaga- lembaga seperti Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, dan Kerjasama antar desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016). perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terkait lokasi penelitian, penelitian Dura (2016) dilakukan pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, sementara itu penelitian ini dilakukan di seluruh desa Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 15 Desa.

Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika Alokasi Dana Desa dikelola untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa dan kepentingan masyarakat maka desa akan lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti dengan Judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada**

Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Benai?
2. Apakah Kebijakan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Benai ?
3. Apakah Kelembagaan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Benai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Benai.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat desa di Kecamatan Benai.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Benai.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang pengelolaan alokasi dana desa terutama bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kesejahteraan msyarakat sehingga menghasilkan kinerja yang baik, dan kinerja yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa untuk kesejheraan masyarakat.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kecamatan Benai dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai kesejahteraan masyarakat yaitu melalui peningkatan kebijakan dan kelembagaan desa dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengsucceskan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Desa

Menurut Kartodihadikiesumo (1984) dalam Salman (2012:1) “desa” dusun “desi” asalnya dari perkataan sanskrit yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya disumatera barat dengan istilah negeri, di aceh dengan istilah gampong hal ini merupakan salah satu pangkuan dan penghormatan pemerintahan terhadap asal usul adat istiadat setempat. Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub. oleh karena itu, mereka disebut bermasyarakat paguyuban (*gemeinscchaft*). Dalam konteks UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa dibedakan dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui negara. Sedangkan Kelurahan adalah satuan administrasi pemerintah dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari Kabupaten/Kota.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah adalah proses cara pembuatan pemerintah yang berdasarkan Demokrasi Gubernur 16 memegang tumpuk di daerah tingkat 1 segala urusan yang dilakukan oleh negara yang dilakukan oleh negara yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Pemerintah merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang menyelenggarakannya ditunjukkan kepada desa. Pemerintah desa proses dimana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat disamping kewenangan dan hak memiliki kepala desa dan konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Sejarah perjalanan tata pemerintahan Daerah/Desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 kurang memberikan kebebasan Daerah/Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataannya dengan berbagai Undang-Undang Pemerintahan, desa diperlemah karena diambil beberapa penghasilannya dan hak ulahnya (Widjaja,2003:7).

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa

mempunyai wewenang (Nurcholis, 2004 :74).

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

2.1.3 Alokasi Dana Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemsayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengelokasian ADD dalam APBDesa wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.
2. Paling banyak 30% dan jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa.
2. Keuangann desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalam nya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pebdapatan asli desa, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewarganegaraannya.

3. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
4. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
5. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai sosial budaya keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
6. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
8. Meningkatkan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
9. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.
10. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

Menurut Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 14 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa adalah dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana Ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 11 Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup
 - b. peningkatan kesejahteraan
 - c. penanggulangan kemiskinan
 - d. peningkatan pelayanan publik

Alokasi dana desa dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Pemerintahan desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati kepala bagian pemerintahan desa , sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kepada kabupaten/kota atau kepada Pengelola Badan Keuangan Daerah (BPKD) atau kepala Badan Pengelola Keuangan dan Keayaan Aset Daerah (BPKKAD).

Kepala bagian keuangan setda atau kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) atau kepala Badan Pengelola Keuangan dan Keayaan Aset Daerah (BPKKAD) akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dalam APBDesa sepenuhnya dilakukan oleh tiim

pelaksana desa yang mengacu pada peraturan Bupati/wali kota. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah bersumber 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
- b. Penyertaan model usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- c. Biaya untuk pengedaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan Lingkungan dan Permukiman.
- e. Teknologi tepat guna.
- f. Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan.
- g. Kegiatan lain yang dianggap penting.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak atas desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipti, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Aloksi Dana Desa desa memiliki kepstian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa tersebut akan mendorong otonomi desa. Sekaligus sebagai usaha untuk mansejahterakan masyarakat desa. APBD, dan APBN (Rusyian, 2018:3).

2.1.4 Pengertian Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN (Rusyan, 2018:3). Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, dalam penjelasan .Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Menurut Sujarweni (2015: 123) keuangan desa tersebut terdiri atas;

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Desa

- 1) hasil usaha desa
- 2) hasil kekayaan desa
- 3) hasil swadaya dan partisipasi masyarakat
- 4) lain-lain pendapatan asli desa

b. Bagi Hasil Pajak Daerah

c. Bagian Dari Retribusi Daerah

d. Alokasi Dana Desa

e. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga

2. Belanja Desa

- a. Kelompok Belanja Langsung
 - b. Kelompok Belanja Tidak Langsung
3. Pembiayaan
- a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

2.1.4.1 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 asas pengelolaan keuangan desa terdiri dari :

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.1.4.2 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29, 30, 33 dan 34 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Perencanaan
 - a) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - b) Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa.

- c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di sampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan

2. Pelaksanaan

- a) Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.
- b) Pelaksana kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- c) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- d) Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran.

3. Penatausahaan

- a) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- b) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- c) Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.
- d) Bendahara desa mepertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- e) Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada kepala desa.
- f) Saat ini penatusahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama sistim keuangan desa (siskeudes).

4. Pelaporan

- a) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota
- b) Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan
- c) Laporan akhir tahun dilaporkan disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

- a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat.

2.1.5 Akuntabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Sujarweni (2015:28), menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accounttability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Bentuk akuntabilitas menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018 :141) sebagai berikut :

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. Cara untuk mengetahui keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, yaitu adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program maupun kebijakan pembangunan di daerah.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi. Cara untuk mengerahui akurasi dan kelengkapan informasi, yaitu informasi yang berkaitan dengan prograam/kebijakan telah disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap mencakup seluruh program/kebijakan di daerah.
3. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan. Cara untuk mengetahui penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, yaitu setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah telah disosialisasikan kepada masyarakat

serta telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program dan kebijakan di daerah.

4. Kelayakan dan konsistensi. Cara untuk mengetahui kelayakan dan konsistensi, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat sebelumnya, kebijakan dan program yang dilaksanakan apakah layak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dalam pelaksanaan telah sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang telah disepakati.
5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. Cara untuk mengetahui penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, yaitu adanya hasil sebuah keputusan kebijakan daerah yang disebarkan di media masa dan masyarakat dapat mengetahui informasi program dan kebijakan pembangunan.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan dilakukan secara bersama-sama dengan cara dan berhasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Adapun definisi-definisi dari akuntabilitas, yaitu sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Selain itu ada pun ruang lingkup akuntabilitas menurut Mardiasmo (2014:85), ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja, tetapi meliputi:

1. *Fiscal Accountability*

Akuntabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi.

2. *Legal Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang maupun peraturan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pemegang amanah.

3. *Program Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan.

4. *Prosess Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi daerah secara ekonomis dan efisien.

5. *Outcome Accountability*

Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

2.1.6 Good Gevernance

Menurut Krina (2003 :5) *Good governance* yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan perbedaan antara

mereka.

Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Tetapi untuk mengimbangi negara suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi. Hak asasi manusia dan dihangainnya pluralism. *Good governance* sangat terkait dengan dua hal yaitu:

1. Good governance tidak dapat dibatasi hanya pada tujuan ekonomi.
2. Tujuan ekonomi tidak dapat dimpai tanpa prasyarat politik tertentu.

2.1.6.1 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintah. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance* (Hendarto, 2002: 2).

United Nations Development Programs (UNDP) merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu partisipasi masyarakat, Kerangka hukum yang adil, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas, dan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki visi jauh kedepan. sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi eksekutif dan bertanggungjawab. Asian development bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum. Jelas bahwa jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi

tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dan satu pakar ke pakar lainnya, namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance yaitu (1). Akuntabilitas (2). Transparansi (3). Partisipasi masyarakat.

2.1.7 Kebijakan Desa

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut. meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus. Pemerintah desa secara formal memiliki wewenang dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara positif dalam bentuk peraturan desa, namun terlepas dari sudut pandang formalitas, setiap desa secara tradisional memiliki kearifan lokal dalam setiap penyelesaian masalah desa. Oleh karena itu pemerintah desa sebagai lembaga formal negara tidak harus serta merta membawa mentah-mentah setiap standar operasional dan ketentuan negara secara umum.

Namun pemerintah desa secara bijak harus menyesuaikan dan memposisikan diri dengan kearifan serta norma-norma yang ada di suatu daerah, apalagi setiap daerah memiliki kearifan yang berbeda-beda, maka dari itu setiap lembaga negara yang berada di level paling bawah harus memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi suatu kebijakan, program atau segala bentuk keputusan pemerintah desa tidak harus berbentuk peraturan desa yang mengikat secara formal berdasarkan hukum positif negara. Akan tetapi desa secara tradisional memiliki norma-norma tersendiri dalam setiap pemecahan permasalahan desa yang bertujuan menentukan arah pembangunan desa sendiri, akan tetapi tetap diharapkan pemerintah desa dapat berperan aktif sebagai bentuk penerapan tugas dan fungsi pemerintah yakni fungsi pelayanan, fasilitator serta inisiator pemecahan masalah publik dalam lingkup desa itu sendiri baik dalam bentuk formal maupun tidak formal, karena pada dasarnya kembali pada keutamaan efektivitas pada setiap bentuk kebijakan dalam mencapainya yaitu membawa masyarakat ke arah pembangunan yang lebih baik.

2.1.7.1 Bentuk-Bentuk Kebijakan Desa

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Memfasilitasi peningkatan rutinitas pemerintah desa
 - b. Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga-lembaga lainnya ditingkat desa

- c. Mempersiapkan data, informasi dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan dan perkembangan desa.
 - d. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi dana desa
 - e. Memfasilitasi kerjasama antar desa.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa (jalan lingkungan, jembatan, jalan pertanian, irigasi, drainase, TPT)
 - b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan)
 - c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, sekolah dan pusat pemerintahan.
 - d. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa serta penguatan permodalan BUMDesa
3. Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

- b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI)
- e. Perwujudan kemandirian pangan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna di pedesaan (dari sektor pertanian).

2.1.7.2 Indikator Kebijakan Desa

Menurut Purwanto (2015:106-110) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel kebijakan desa yaitu (Akses, bias, ketepatan peleyanaan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan) indikator ini juga digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu (Dura, 2016). Indikator tersebut antara lain:

1. Akses

Akses mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti gender, etnisitas, agama dan afiliasi politik. Akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

2. Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

3. Ketepatan Pelayanan

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam penerapan kebijakan ini suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.

4. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluar kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

5. Kesesuaian program dengan kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

2.1.8 Kelembagaan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kelembagaan Desa adalah Lembaga atau institusi wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan

pelayanan (Service) dan pemberdayaan (empowerment), serta pembangunan (development) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Istilah lembaga identik dengan organisasi. dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. didalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi- organisasi lainnya.

2.1.8.1 Jenis-Jenis Lembaga di Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terdapat enam lembaga desa yakni :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Lembaga kemasyarakatan
4. Lembaga Adat
5. Kerjasama Antar Desa
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, Desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti yang disebutkan diatas, untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerinthan Desa., pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Masing-masing lembaga Desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa yakni:

1. Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut;
2. Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut.

2.1.8.2 Kedudukan Kelembagaan Desa

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangua masyarakat desa. Dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh Perenagkat Desa selaku pembantu. tugas-tugas Kepala Desa, Perangkat Desa merupakan unsur yang terdiri dari :

1. Unsur staf (Sekretariat Desa)
2. Unsur lini (pelaksana teknis lapangan)
3. Unsur kewilayahan (para Kepala Dusun)

Diantara unsur pemerintah desa yaitu unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur

pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana teritorial (Kepala Dusun), senantiasa ditata dalam suatu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi Pemerintah Desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (DPD)

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. Anggota BPD dapat dipilih paling banyak selama 3 (tiga) periode. jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga kemasyarakatan desa wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

1. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
2. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
3. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
4. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. lembaga adat mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengukuran terhadap adat istiadat masyarakat desa. Kerjasama Antar Desa, Kerjasama antar Desa meliputi: Pengembangan Usaha Bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing.

- a. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan desa, dan pemberdayaan antar desa.
- b. Bidang keamanan dan ketertiban.

6. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha BUMDes digunakan untuk :

1. Pengembangan usaha.
2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir.

2.1.8.3 Indikator Kelembagaan Desa

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kelembagaan desa adalah sebagai berikut (Dura,2016):

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Sebuah Kelembagaan/Organisasi dikatakan efektif jika telah tepat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan dalam penelitian ini dilihat dari seberapa besar tercapainya tujuan lembaga, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan kelembagaan/organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dalam penelitian ini dilihat dari adanya peran aktif

anggota sebuah kelembagaan dalam mendukung pembangunan desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa agar terwujudnya kesejahteraan.

3. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu kelembagaan/organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi. Integrasi dalam penelitian ini dilihat dari adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kelembagaan desa tentang pembangunan kepada masyarakat, pengembangan konsensus, dan juga komunikasi antara pemerintahan desa, BPD, LPMD dan masyarakat desa.

2.1.9 Kesejahteraan Masyarakat

Dalam istilah umum, kesejahteraan menunjuk keadaan yang baik. kondisi manusianya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Kesejahteraan dapat diukur dari segi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik (Widyastuti, 2012).

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Hukom, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa apad negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermanfaat.

Dalam penelitian (Dura, 2016) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang salah satunya ialah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dimana keterkaitan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam penerapan dibidang ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran untuk menilai keadaan suatu masyarakat untuk dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa penjelasan

kesejahteraan masyarakat menurut organisasi-organisasi sosial.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

2. Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 8, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas transportasi. dari beberapa pengertian kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

1. Tingkat pendapatan
2. Tingkat pendidikan,
3. Tingkat kesehatan
4. Fasilitas Pembangunan

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini di antaranya disajikan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Justita Dura (2016)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat
2	Vica Mayela Laurentya (2017)	Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Dana APBDesa dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidiarjo)	Perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari implementasi pengelolaan AAPBDesa dilihat dari hasil fisik, wawancara dan observasi secara garis besar telah menunjukkan pengelolaan yang akuntabel sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015.

Lanjutan tabel 2.1

3	Yuli Kurniawati (2017)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus pada desa Distrik Sentani Kabupaten Jayapura)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat desa Distrik Sentani.
4	Novianti Ruru (2017)	Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan (Studi Kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)	Secara keseluruhan penerapan alokasi dana desa suwaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan. 2. Penerpan Alokasi Dana Desa sudah sesuai engan tujuan pada umumnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik.
5	Fadhil Ashar (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhdap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di desa Uekuli Kecamtn Tojo Una-Una)	1.Akuntabilitas perencanaan pengelolaan alokasi dana desa pada tahap proses pembuatan kepuusan indikator-indikator untuk menjamin akuntabilitas publik juga sudah dipenuhi oleh pemerintah desa keterbukan informasi kepada masyarakat prinsip-prinsip administrasi kejelasan sasaran dan kesesuaian dengan visi misi desa serta meknisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi suah dipenuhi oleh pemerintah desa. 2.Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan hasil wawancara data observasi yang telah

			dilakukan peneliti indikator-indikator melaksanakan pemerintahan desa seperti pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
6	Emi Tahir (2018)	Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat tudi Kasus pada Desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi)	1.Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. 2.Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
7	Rina Indrawati (2018)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)	1.Ada pengaruh yang signifikan antara variabel Pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat. 2.Ada pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan desa terhadap pemberdayaan masyarakat 3. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kelembagaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat. 4.Ada pengaruh secara simultan antara variabel pengelolaan alokasi dana desa, kebijakan desa , dan kelembagaan desa terhadap pemberdayaan penduduk

8	Hendriyono (2018)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)	<p>1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa koto pangean sudah menarapkan prinsip partisipatif dn akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan desa yang mengatur kegiatan Keuangan Alokasi Dana Desa dan ikut sertanya dalam permusyawaratan pembangunan.</p> <p>2. Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa didesa koto pangean sudah akuntabel. hal ini membuktikan dengan adanya bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.</p> <p>3. Tahap pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di esa koto pangean sudah akuntabel. hal ini membuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban APBDesa yang telah terintegrasi dengan RKPDesa.</p> <p>4. Dari segi transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa koto Pangean belum diterapkan. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada media yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat desa.</p>
9	Winda Winardi (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa Terhadap kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa Berpengaruh signifikan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

10	Netri Rahmelia (2019)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhdap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti)	<p>1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kampung Baru Timur Tahun 1016-2018 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan desa yang mengatur kegiatan Keuangan Alokasi Dana Desa.</p> <p>2. Tahap pelaksanaa Alokasi Dana Desa dikampung bru tahun 2016 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.</p>
11	Vita Faizah (2019)	Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Pokak Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)	Secara umum pengelolaan dana desa diperuntukkan untuk bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hal tersebut' sudah sesuai dengan Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2018. Dari sisi Pendidikan, kesehatan dan pertanian dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat, sedangkan dari sisi ekonomi dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat desa Pokak.

Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2019

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 11 Permendesa No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dimaksud untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. dengan adanya Alokasi Dana Desa desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan. Alokasi Dana Desa tersebut akan terus mendorong otonomi desa sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa harus mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan

positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan diatas, maka rumusan hipotesis sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.3.2 Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten.

Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus. Kebijakan pemerintah desa harus optimal dan berfungsi serta tugas kebijakan desa harus berjalan dengan baik. Program-program yang sudah dibuat oleh aparatur desa semuanya harus dilaksanakan seperti penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. pemerintah desa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendukung sepenuhnya kegiatan program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuannya yaitu membawa masyarakat kearah pembangunan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) menyimpulkan bahwa Kebijakan desa berpengaruh secara signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) menyatakan bahwa Kebijakan Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan diatas, maka rumusan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kebijakan Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.3.3 Pengaruh Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diatur mengenai kelembagaan Desa. Lembaga Desa dapat dijadikan sebagai wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. dengan adanya lembaga, sebuah desa dapat mencapai tujuannya. Salah satu tujuannya yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti memberikan pelayanan dan pemberdayaan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) menyimpulkan bahwa

Kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) menyatakan bahwa kelembagaan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

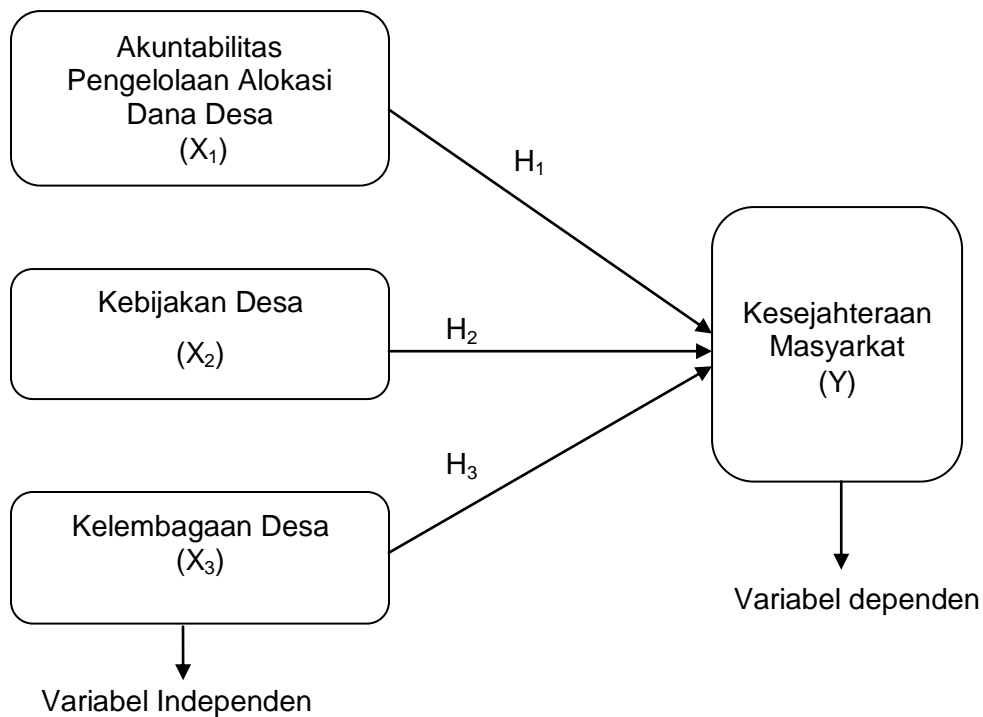
Dari penjelasan diatas, maka rumusan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kelembagaan Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka teoritis penelitian ini dapat disampaikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Penelitian Terdahulu oleh Dura (2016)

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang disusun peneliti kemudian akan di uji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan selanjutnya. Hipotesis berkaitan dengan hubungan antara variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian (Kuncoro, 2013:59). Berdasarkan Kerangka Pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Kecamatan Benai.
- H₂ : Kebijakan Desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Kecamatan Benai.
- H₃ : Kelembagaan Desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Kecamatan Benai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah berupa angka atau bilangan yang absolut dapat dikumpulkan dan dibaca relatif lebih muda, dengan melihat pada jumlah masing-masing angka seorang peneliti dapat membuat persepsi (Sunyoto, 2013:21). Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun penelitian berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dokumen data empiris lapangan. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistic, menaksir dan meramalkan hasilnya. Desain penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif harus terstruktur, baku, formal dan dirancang sematang mungkin sebelumnya.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kausal. Menurut Sugiyono (2010:56) metode kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Desain penelitian kausal sering juga disebut sebagai desain kausal komparatif. Desain kausal komparatif digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 15 Desa yang ada di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Juni 2020. Adapun rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Waktu dan Kegiatan Penelitian

Jadwal Penellitian									
Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan								
	2019			2020					
Bulan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Pencarian Data Awal									
Penyusunan Proposal									
Pengajuan Proposal									
Penyerahan Proposal kepada Pembimbing									
Bimbingan									
Seminar Proposal									
Revisi Proposal									
Pengambilan Data Skripsi									
Ujian Khomperensif									

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun ,2019

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiono (2017:149) Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di peajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Benai yang berjumlah 15 Desa. Total populasi adalah 299 orang.

Tabel 3.2
Jumlah Populasi pada seluruh Perangkat Desa di Desa Kecamatan Benai

No	Nama Desa	Jumlah Perangkat Desa
1	Kota Benai	10 Orang
2	Talontam	22 Orang
3	Banjar Benai	50 Orang
4	Gunung Kesiangan	16 Orang
5	Banjar Lopak	16 Orang
6	Pulau Kalimantan	12 Orang
7	Tanjung Simandolak	19 Orang
8	Pulau Ingu	19 Orang
9	Koto Simandolak	19 Orang
10	Tebing Tinggi	29 Orang
11	Pulau Lancang	16 Orang
12	Pulau Tongah	15 Orang
13	Ujung Tanjung	16 Orang
14	Pulau Bungin	22 Orang
15	Benai Kecil	18 Orang
	Total	299 Orang

Sumber: Kecamatan Benai, 2019

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:149). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan *purposive Sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah dibuat oleh peneliti (Krisherdian,2015). dari penjelasan tersebut ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 orang Perangkat desa, yaitu Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan anggota BPD yang terdiri dari Ketua BPD, Wakil ketua, dan Sekretaris yang di ambill dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Benai.

Alasan 6 orang perangkat desa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini karena perangkat desa tersebut yang berperan aktif dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 3.3
Jumlah Sampel pada Seluruh Perangkat Desa di Desa Kecamatan Benai

No	Nama Desa	Jumlah Perangkat Desa
1	Kota Benai	6 Orang
2	Talontam	6 Orang
3	Banjar Benai	6 Orang
4	Gunung Kesiangan	6 Orang
5	Banjar Lopak	6 Orang
6	Pulau Kalimantan	6 Orang
7	Tanjung	6 Orang
8	Pulau Ingu	6 Orang
9	Simandolak	6 Orang
10	Tebing Tinggi	6 Orang

11	Pulau Lancang	6 Orang
12	Pulau Tengah	6 Orang
13	Ujung Tanjung	6 Orang
14	Siberakun	6 Orang
15	Benai Kecil	6 Orang
	Total	90 Orang

Sumber: Kecamatan Benai, 2019

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berupa angka dan bilangan yang absolut dapat dikumpulkan dan dibaca relative lebih muda. Dengan melihat pada jumlah masing-masing angka seorang peneliti dapat membuat persepsi (Sunyoto, 2013:21).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara (Supomo, 2013:146-147). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner yang telah disusun sebelumnya untuk diisi oleh responden. Peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung kepada Perangkat desa dan masyarakat desa pada 15 desa yang ada di Kecamatan Benai. Selain itu peneliti juga menjelaskan cara pengisian kuesioner. Hal tersebut bertujuan agar peneliti dapat mengisikan pendapatnya melalui koesioner dengan tepat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang telah disusun. Data yang diambil merupakan data primer dan koesioner ini bersifat tertutup. Kuesioner bersifat tertutup adalah kuesioner yang menyajikan pertanyaan atau pernyataan dan pilihan jawaban sehingga responden hanya dapat memberikan tanggapan terbatas pada pilihan yang diberikan (Krisherdian, 2015). Untuk memperoleh data yang sebenarnya kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi tempat responden (Perangkat desa dan ketua BPD) di desa kecamatan benai.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Pada bagian definisi secara jelas tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelirtian ini. Variabel bebas (Independen) dan variabel terikat (Dependen).

1. Variabel Independen (X)

Menuru Sunyoto (2013:24) Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa.

2. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sunyoto (2013: 24) variabel dependen adalah variabel yang besar kecilnya tergantung pada nilai variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian

ini adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012). Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi, (1) peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, (2) peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, (3) memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

3.6.2 Definisi Operasional

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X_1)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, "Akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa". Pengelolaan keuangan desa mencakup: 1) Perencanaan (penyusunan)

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa); 2) Pendapatan dan belanja; 3) Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain; 4) Pembelanjaan atau alokasi.

2. Kebijakan Desa (X_2)

Kebijakan Desa adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa program, peraturan dan kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila didukung oleh faktor yaitu ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang kebutuhan publik serta didorong oleh dukungan responsibilitas masyarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah termasuk taat kepada hukum dan peraturan. (Tachjan: 2006).

3. Kelembagaan Desa (x_3)

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Kelembagaan Desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintah desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowerment) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (UU No. 11 Tahun 2009)	1. Tingkat Pendapatan 2. Tingkat Pendidikan 3. Tingkat Kesehatan 4. Tingkat Pembangunan (Badan Pusat Statistik 2019)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) (X ₁)	Alokasi Dana Desa yaitu dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). (Permedagri 20 tahun 2018)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban (Permedagri 20 tahun 2018)
Kebijakan Desa (X ₂)	segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa pogram, peraturan dan kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila didukung oleh faktor yaitu ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang kebutuhan publik serta didorong oleh dukungan responsibilitas mayarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah termasuk taat kepada hukum dan peraturan. (Tachjan. 2006)	1. Akses 2. Bias 3. Ketepatan Pelayanan 4. Akuntabilitas 5. Kesesuaian Program dengan kebutuhan Purwanto (2015:106-110)

Lanjutan tabel 3.4

Kelembagaan Desa (X ₃)	Lembagaan Desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (UU No 6 Tahun 2014)	1. Pencapaian Tujuan 2. Adaptasi 3. Integritas. (Justita Dura,2016)
------------------------------------	---	--

Sumber:Modifikasi Penelitian,2019

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (x1), Kebijakan Desa (x2), Kelembagaan Desa (X3), Kesejahteraan Masyarakat sebagai variabel (Y). Untuk mengukur Pendapat responden digunakan 5 skala *likert dengan memberi skor dari jawaban kuesioner* yang di isi responden dinyatakan dalam beberapa respon alternative:

1= Sangat Tidak Setuju

2= Tidak Setuju

3= Kurang Setuju

4= Setuju

5= Sangat Setuju

Sementara kriteria penilaian terhadap rata-rata nilai indikator dan nilai variabel dalam penelitian ini di tentukan sesuai dengan skala *likert* yang digunakan (Sugiyono,2014:94):

1. $1,00 - 1,80$ = Responden memiliki penilaian yang sangat tidak baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
2. $>1,80 - 2,60$ = Responden memiliki penilaian yang tidak baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
3. $>2,60 - 3,40$ = Responden memiliki penilaian yang cukup baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
4. $>3,40 - 4,20$ = Responden memiliki penilaian yang baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.
5. $>4,20 - 5,00$ = Responden memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator atau variabel yang bersangkutan.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sujarweni (2016) Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan berbagai karakteristik data seperti mean, modus, quartile, varian dan standar deviasi. Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan, peringkasan data dan penyajian hasil peringkasan tersebut. Penelitian akan menggunakan maximum, minimum, mean dan standar deviasi dalam bentuk tabulasi data responden dari hasil kuesioner. pengujian dari statistik deskriptif untuk menguji dan menjelaskan karakteristik sampel data penelitian yang diobservasi.

3.8.2 Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner ,tersebut (Sunyoto, 2013: 85). Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut:

1. Jika r hitung positif dan r hitung $> r$ tabel maka butir pernyataan tersebut adalah valid.
2. Jika r hitung negatif dan r hitung $< r$ tabel maka butir pernyataan tersebut adalah tidak valid.

2) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 7 konsisten (Sunyoto, 2013: 81).

Pengujian reabilitas yang digunakan adalah one shot atau pengukuran sekali saja. disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reabilites dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan Cronbach Alpha > 0.60 atau lebih besar dari pada 0.60 .

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Setelah mendapatkan model regresi, maka interpretasi terhadap hasil yang diperoleh tidak bisa langsung dilakukan. Hal ini disebabkan karena model regresi harus diuji terlebih dahulu apakah sudah memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali (Sunyoto, 2013: 92).

Uji normalitas ada dua cara yaitu, Cara Statistik dan cara Grafik Histogram dan Normal Probability Plot.

2) Uji multikolinearitas

Uji klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independent variabel. Dimana akan diukur keeratan Hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinearitas, jika koefisien korelasi antar variabel (X1 dan X2, X2 dan X3 dan seterusnya) lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50; 0,70; 0,80; dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (50,60) (Sunyoto, 2013: 87).

3) Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika

residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas.

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara Z Prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y prediksi - Y riil) (Sunyoto, 2013: 90).

4) Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Dengan demikian dapat dikatakan jika uji asumsi klasik autokorelasi dilakukan untuk data time series atau data yang mempunyai seri waktu.

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin -Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
2. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan $+2$ atau $-2 < DW < +2$
3. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas $+2$ atau $DW > +2$

3.8.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji statistik t dan uji koefisien determinasi (R^2) uji statistik t menunjukkan pengaruh satu variabel

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi adalah 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikansi secara parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis ditolak yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah perbandingan antara variasi Y (dependen) yang dijelaskan oleh X (independen). Koefisien ini menunjukkan persentase variasi variabel dependen (Wijaya, 2012:104).

Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun Simultan. Analisis ini untuk menguji hipotesis 1 sampai 6. Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kesejahteraan Masyarakat

a = Konstanta

X₁ = Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

X₂ = Kebijakan Desa

X₃ = Kelembagaan Desa $\beta_1 - \beta_2 - \beta_3$ = Koefisien regresi berganda

e = *error term*

3.8.5 Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu terhadap variabel dependen, Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu:

a) Membandingkan t hitung dengan t table

(1) Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

(2) Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

b) Melihat Probabilities Values

Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$:

1. Jika probabilities $> 0,05$, maka hipotesis ditolak
2. Jika probabilities < 0.05 , maka hipotesis diterima
3. Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif atau negatif) walaupun berada dibawah tingkat signifikan, maka hipotesis ditolak.

3.8.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam output SPSS koefisien determinasi terletak pada tabel Model Summary dan tertulis Adjusted R Square.

Dalam R^2 sebesar 1, berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Jika nilai R^2 berkisar antara 0 sampai dengan 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 45).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Benai

Kecamatan Benai adalah salah satu dari 15 kecamatan yang ada didalam Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 113,83 Km² yang berbatasan dengan :

- 1) Sebelah utara dengan Kecamatan Kuantan Tengah
- 2) Sebelah selatan dengan Kecamatan Sentajo Raya
- 3) Sebelah barat dengan Kecamatan Sentajo Raya
- 4) Sebelah timur dengan Kecamatan Pangean

Tinggi pusat pemerintah wilayah kecamatan Benai dari permukaan laut adalah 25 s/d 30 meter, yang posisi pusat pemerintahannya ada di Desa Benai Kecil, yang kurang lebih jaraknya 10 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, dapat ditempuh melalui darat.

Wilayah Kecamatan Benai terdiri dari dataran hingga bergelombang, elevasi 2 – 3°, berada pada zona geseran, patahan dengan arah belum diketahui. Potensi terhadap banjir disekitar daerah aliran sungai (DAS), erosi dan longsor berpotensi terjadi pada bagian tengah. Aliran Permukaan berupa beberapa sungai dan rawa bagian tenggara. Aliran permukaan lain berupa aliran air tanah dalam diperkirakan cadangannya sebesar 15 juta m³ pertahun (cekungan Teluk Kuantan bagian Utara). Daerah ini mayoritas sektor pertanian yang didominasi oleh perkebunan karet, dan

juga terkenal objek wisata Danau Rawang Udang yang terletak di Desa Talontam Benai.

Tabel 4.1
Luas Wilayah di Desa Kecamatan Benai

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah Km²
1	Kota Benai	360	1,76
2	Talontam	962	1,85
3	Banjar Benai	3.536	19,62
4	Gunung Kesiangan	639	25,99
5	Banjar Lopak	664	5,15
6	Pulau Kalimantaning	460	21,93
7	Tanjung Simandolak	486	2,00
8	Pulau Ingu	1.409	10,00
9	Koto Simandolak	1.548	10,10
10	Tebing Tinggi	1.636	5,47
11	Pulau Lancang	572	4,47
12	Pulau Tongah	636	2,72
13	Ujung Tanjung	378	2,86
14	Pulau Bungin	968	4,64
15	Benai Kecil	584	2,60
	Total	14.838	121,16

Sumber :Kantor Camat Benai, 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Desa Gunung Kesiangan adalah desa yang paling luas wilayahnya dengan luas wilayah 25,99 Km², dan yang paling kecil luas wilayah desanya di Kecamatan Benai adalah Desa Kota Benai dengan luas wilayah 1,76 km².

4.1.2 Keadaan Penduduk

Penduduk asli daerah Kuantan Singingi adalah suku melayu sebagaimana halnya suku-suku melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku melayu di daerah ini juga memiliki sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku melayu dengan suku-suku pendatang tersebut. Penduduk Kecamatan Benai disamping suku melayu (asli) adalah suku jawa dan suku minang.

Masyarakat Kecamatan Benai pada umumnya tinggal diperkampungan sepanjang Batang (sungai) Kuantan, pilihan ini dilakukan atas kepentingan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Sungai Kuantan selain sarana transportasi juga sebagai tempat berbagai aktivitas lain seperti mandi, mencuci, dan sebagainya. Setiap pemukiman akan dijumpai berbagai tanaman di sekelilingnya yang dinamakan *Pelak*.

4.1.3 Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai, seseorang akan memiliki peluang dan kemampuan usaha yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik. Selain dari pada itu, kuantitas dan kualitas serta pendistribusian tenaga guru adalah

persoalan lain yang juga harus diatasi, baik secara kuantitas maupun kualitas.

4.1.4 Kesehatan

Pembangunan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan berkualitas ditujukan pada perbaikan gizi, upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta upaya jangka waktu usia harapan hidup. Permasalahan lain yang sangat perlu diperhatikan dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat tetap hidup sehat, bersih serta peduli terhadap lingkungan tempat tinggal, penyediaan air bersih, pembuangan kotoran keluarga (jamban), pembuangan sampah maupun limbah dan meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat sehingga akan mencapai kualitas hidup dan sumber daya manusia yang prima.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program dan memperluas berbagai jangkauan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Status kesehatan penduduk dapat diukur dengan menggunakan angka kesakitan (*morbidity rate*) yaitu keluhan atas suatu penyakit yang dirasakan dan bukan atas hasil pemeriksaan dokter atau petugas kesehatan lainnya.

Pembangunan kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terlihat semakin bertambahnya jumlah sarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan paramedis serta meningkatnya tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Rumah Sakit Pemerintah. Keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan menciptakan bagian yang harus diprioritaskan

khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi ibu hamil dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dari gizi bayi yang akan dilahirkan. Pola pemberian Air Susu Ibu (ASI) untuk balita tetap disosialisasikan karena merupakan alternatif yang paling baik.

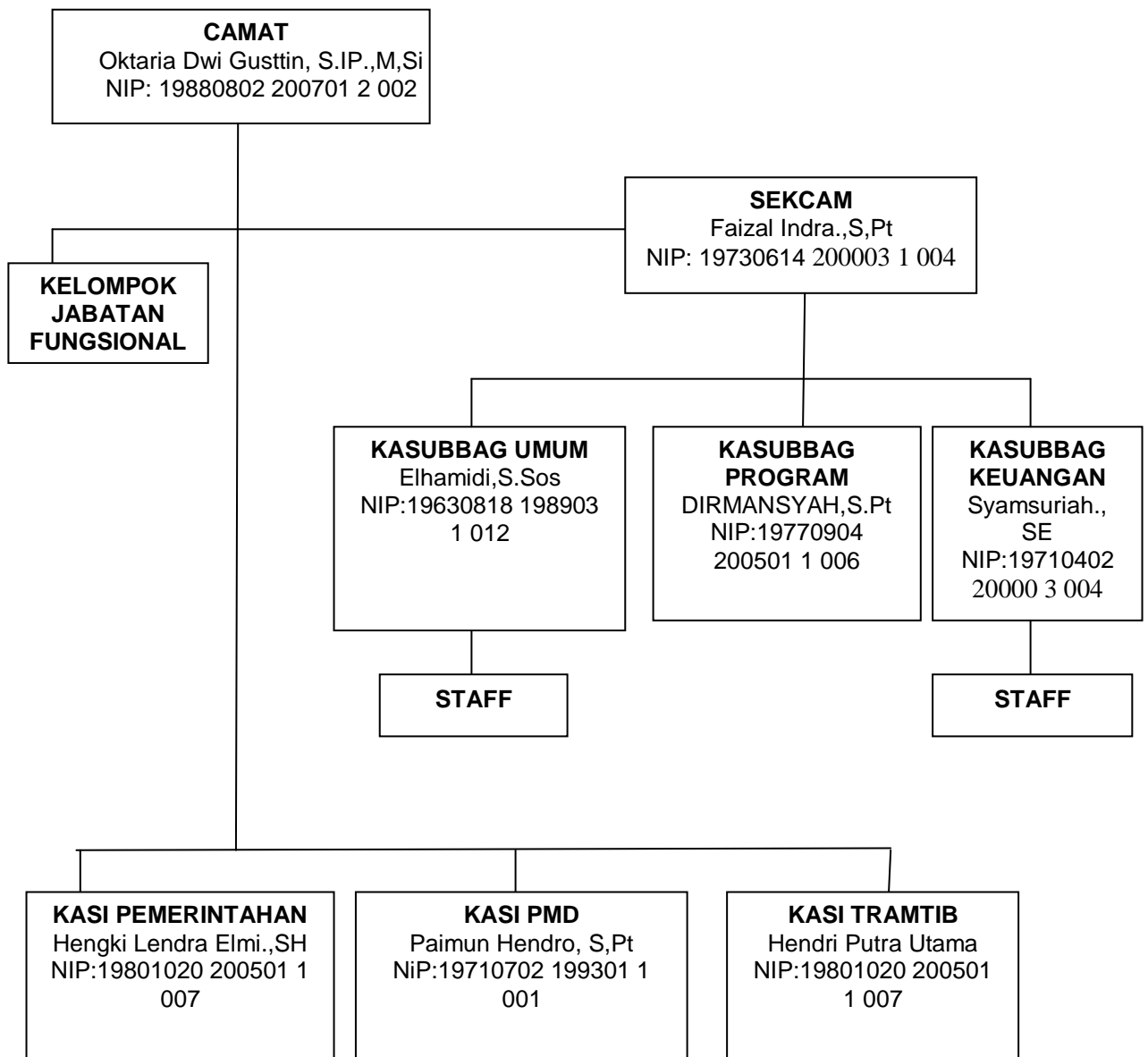
4.1.5 Agama

Pembinaan sumber daya manusia Indonesia adalah berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya. Artinya, bangsa Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang berkesinambungan, antara intensitas spiritual dan intensitas intelektual. Dengan kata lain, bangsa Indonesia haruslah sebagai individu yang beriman, berilmu, dan berketerampilan teknologi yang tinggi.

Secara demografis, masyarakat Kecamatan Benai adalah masyarakat yang sangat intens dengan nuansa cultural religius Islami. Islam adalah agama mayoritas Kecamatan Benai, tanpa menafikkan keberadaan agama minoritas lainnya, heterogenitas etnis dan budaya secara sosial dapat dipersatukan oleh homogenitas agama, yaitu Islam.

4.1.6 Struktur Organisasi Kecamatan Benai

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kecamatan Benai



Sumber : Kantor Camat Benai, 2020.

4.1.6.1 Wewenang Pemangku Jabatan

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- 8) Melaksanakan monitoring terhadap seluruh kegiatan di wilayah kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan Perencanaan, pengolahan administrasi keuangan dan kepegawaian.

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- 2) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan Masyarakat;
- 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan unit kerja; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, dan investasi prasarana dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian serta penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan dibidang urusan umum dan keuangan;
- 2) Melaksanakan urusan kesekretariatan;
- 3) Menyimpan, Mengatur dan Memelihara arsip dinas;
- 4) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;

- 5) Menyusun perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan menyusun petunjuk pelaksanaannya;
- 6) Memelihara gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan kantor kecamatan;
- 7) Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas;
- 8) Melakukan Pengadaan perlengkapan;
- 9) Menyimpanan, Menerima dan mendistribusikan perlengkapan;
- 10) Menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
- 11) Mengurus administrasi peralatan, perlengkapan serta mengurus administrasi inventarisasi kekayaan milik Negara;
- 12) Melaksanakan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas;
- 13) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- 14) Mengelola sistem informasi manajemen perlengkapan;
- 15) Mengelola administrasi kepegawaian dan Mengelola data kepegawaian;
- 16) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan administrasi Keuangan, Menyusun Rencana kegiatan anggaran (RKA)dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
- 17) Mengelola pembinaan dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan;
- 18) Melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- 19) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas;

- 20) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah;
- 21) Melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
- 22) Menyusun laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan;
- 23) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
- 24) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana strategis pembangunan di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja di wilayah kecamatan;
- 2) Pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data potensi kecamatan;
- 3) Penyusun Rencana Strategis Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusun rencana dan program pembangunan di wilayah kecamatan;

- 5) Pengelolaan data statistik dan informasi di wilayah kecamatan;
- 6) Pengelolaan sistem informasi manajemen data di wilayah kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan kecamatan;
- 9) Pengevaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kecamatan;
- 10) Penyusun laporan hasil kegiatan di wilayah kecamatan;
- 11) Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan
- 12) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;

- 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan; dan
- 4) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi pemberdayaan masyarakat pekon mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Camat dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangi sebagian urusan otomi daerah sesuai dengan bidangnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pemberdayaan masyarakat pekon mempunyai fungsi:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- 4) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- 6) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.

7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi ketenteraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

4.2 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *Purposive Sampling* yang ditentukan sebelumnya hingga diperoleh sejumlah data yang diolah. Kuesioner disebar sejumlah 90 eksemplar sesuai dengan jumlah sampel penelitiannya. Tingkat pengembalian kuesioner dari responden sejumlah 90 eksemplar (100%), kuesioner yang dapat diolah sebanyak 104 buah. Berikut ini tabel kuesioner yang dapat diolah:

Tabel 4.2
Deskriptif Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	90	100%
2	Kuesioner yang kembali	90	100%
3	Kuesioner yang dapat diolah	90	100%
4	Kuesioner yang tidak dapat diolah	-	-
Jumlah		90	100%

Sumber: Data Olahan, 2020.

4.2.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan anggota BPD yang terdiri dari Ketua BPD, Wakil ketua, dan Sekretaris yang diambil dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Benai yang berjumlah 90 orang. Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir dan pekerjaan.

a. Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden terbagi dalam 2 kelompok dari 90 responden, yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapati karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat seperti di bawah ini:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin Responden	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	65 Orang	72,22%
2	Perempuan	25 Orang	27,78%
Jumlah		90 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 72,22%, sedangkan yang menjadi minoritas adalah responden yang berjenis kelamin perempuan sebesar 27,78%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur responden terbagi dalam 3 kelompok dari 90 responden, yaitu <35 tahun, 36-50 tahun dan >50 tahun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapati karakteristik responden berdasarkan umur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	< 35 Tahun	35	38,89%
2	36-50 Tahun	50	55,56%
3	>50 Tahun	5	5,55%
Jumlah		90 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang berumur 36-50 Tahun sebesar 55,56%, sedangkan yang menjadi minoritas adalah responden yang berumur >50 Tahun sebesar 5,55%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir responden terbagi dalam 3 kelompok dari 90 responden, yaitu Tingkat SMA, S1, dan S2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapati karakteristik responden berdasarkan Pendidikan Terakhir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase
1	SMA	50	55,56%
2	S1	40	44,44%
3	S2	-	-
Jumlah		90 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.5, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang pendidikan Terakhir SMA sebesar 55,56%, sedangkan yang menjadi minoritas adalah responden yang pendidikan terakhir S2 sebesar 0%.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Masa Kerja

Lama masa kerja responden terbagi dalam 2 kelompok dari 90 responden, yaitu 1-5 Tahun dan >5 tahun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapati karakteristik responden berdasarkan Lama masa kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan

No	Lama Masa Kerja Responden	Jumlah	Persentase
1	1-5 Tahun	65	72,22%
2	>5 Tahun	25	27,78%
Jumlah		90 Orang	100%

Sumber: Data Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak atau mayoritas yang menjadi responden yaitu yang lama masa kerja 1-5 Tahun sebesar 72,22%, sedangkan yang menjadi minoritas adalah responden yang lama masa kerja >5 Tahun sebesar 27,78%.

4.3 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013: 19). Analisis data penelitian ini dilakukan pada 43 item pernyataan dalam kuesioner yang dinilai oleh responden masing-masing desa.

4.3.1 Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X_1)

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X_1) terdiri dari 18 item pernyataan item pertama yaitu Sekretaris Desa Menyusun Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa ($X_{1.1}$), item kedua yaitu Sekretraris desa menyampaikan Reperdes APBDesa Kepada Kepala Desa ($X_{1.2}$), item ketiga yaitu Raperdes APBDesa disampaikan Kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut ($X_{1.3}$), item keempat yaitu Raperdes APBDesa disepakati secara bersama ($X_{1.4}$), item kelima yaitu Raperdes APBDesa yang telah disepakati, lalu disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi ($X_{1.5}$), item keenam yaitu Hasil evaluasi yang dilakukan oleh bupati/walikota ditindaklanjuti oleh kepala desa untuk diperbaiki untuk menetapkan Raperdes APBDesa mejadi peraturan desa ($X_{1.6}$), item ketujuh yaitu Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa ($X_{1.7}$), item kedelapan yaitu Bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa ($X_{1.8}$), item kesembilan yaitu Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa ($X_{1.9}$), item kesepuluh yaitu Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa ($X_{1.10}$), item kesebelas yaitu Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya dan diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian disahkan oleh kepala desa ($X_{1.11}$), item kedua belas yaitu Penetausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan dan

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Pencatatan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan aplikasi bernama Sistem keuangan Desa (Siskeudes) atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi (X_{1.12}), item ketiga belas yaitu Bendahara desa mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa (X_{1.13}), item keempat belas yaitu Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati atau Walikota (X_{1.14}), item kelima belas yaitu Kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/Walikota (X_{1.15}), item keenam belas yaitu Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran (X_{1.16}), item ketujuh belas yaitu Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran (X_{1.17}), item kedelapan belas yaitu Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan (X_{1.18}).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (X₁)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X _{1.1}	-	2,22%	38,89%	31,11%	27,78%	100%	3,84	Baik
X _{1.2}	-	6,67%	28,89%	44,44%	20%	100%	3,78	Baik
X _{1.3}	-	7,78%	25,56%	44,44%	22,22%	100%	3,81	Baik
X _{1.4}	-	12,22%	42,22%	41,11%	4,45%	100%	3,38	Baik
X _{1.5}	-	7,78%	20%	51,10%	21,10%	100%	3,86	Baik
X _{1.6}	-	3,33%	23,33%	56,67%	16,67%	100%	3,87	Baik
X _{1.7}	-	1,11%	32,22%	43,33%	23,34%	100%	3,89	Baik
X _{1.8}	-	10%	28,89%	50%	11,11%	100%	3,62	Baik
X _{1.9}	-	3,33%	43,33%	45,56%	7,78%	100%	3,58	Baik
X _{1.10}	-	6,67%	11,11%	60%	22,22%	100%	3,98	Baik
X _{1.11}	-	7,78%	25,56%	44,44%	22,22%	100%	3,81	Baik
X _{1.12}	-	12,22%	42,22%	41,11%	4,45%	100%	3,78	Baik
X _{1.13}	-	6,67%	31,11%	40%	22,22%	100%	3,78	Baik
X _{1.14}	-	1,11%	30%	54,44%	14,45%	100%	3,82	Baik
X _{1.15}	3,33%	17,78%	33,33%	38,89%	6,67%	100%	3,28	Cukup Baik
X _{1.16}	2,22%	15,56%	24,44%	47,78%	10%	100%	3,48	Baik
X _{1.17}	2,22%	17,78%	47,78%	23,33%	8,89%	100%	3,19	Cukup Baik
X _{1.18}	3,33%	11,11%	47,78%	28,89%	8,89%	100%	3,29	Cukup Baik
Rata-Rata	3,65							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas untuk item Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa (X_{1.1}) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 38,89% dengan rata-rata item sebesar 3,84 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Sekretrais desa menyampaikan Reperdes APBDesa Kepada Kepala Desa (X_{1.2}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 44,44% dengan rata-rata item 3,78 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Raperdes APBDesa disampaikan Kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut (X_{1.3})

sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 44,44% dengan rata-rata item 3,78 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Raperdes APBDesa disepakati secara bersama ($X_{1.4}$) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 42,22% dengan rata-rata item 3,38 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Raperdes APBDesa yang telah disepakati, lalu disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi ($X_{1.5}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 51,10% dengan rata-rata item 3,86 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Hasil evaluasi yang dilakukan oleh bupati/walikota ditindaklanjuti oleh kepala desa untuk diperbaiki untuk menetapkan Raperdes APBDesa mejadi peraturan desa. ($X_{1.6}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 56,67% dengan rata-rata item 3,87 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa ($X_{1.7}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 43,33% dengan rata-rata item 3,85 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa ($X_{1.8}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 50% dengan rata-rata item 3,62 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDes tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi

Peraturan Desa (X_{1.9}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 45,56% dengan rata-rata item 3,58 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa (X_{1.10}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 60% dengan rata-rata item 3,98 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya dan diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian disahkan oleh kepala desa (X_{1.11}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 44,44% dengan rata-rata item 3,81 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Penetausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Pencatatan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan aplikasi bernama Sistem keuangan Desa (Siskeudes) atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi (X_{1.12}) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 42,22% dengan rata-rata item 3,78 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Bendahara desa bertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa (X_{1.13}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 40% dengan rata-rata item 3,78 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati atau Walikota (X_{1.14})

sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 54,44% dengan rata-rata item 3,82 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/Walikota ($X_{1.15}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 38,89% dengan rata-rata item 3,28 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran ($X_{1.16}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 47,78% dengan rata-rata item 3,48 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran ($X_{1.17}$) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 47,78% dengan rata-rata item 3,19 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. ($X_{1.18}$) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 47,78% dengan rata-rata item 3,29 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X_1) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item ($X_{1.10}$) sebesar 3,98 kriteria

penilaian baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item ($X_{1.1}$) yang hanya sebesar 3,84. Responden dalam penelitian ini bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berada dalam kategori baik.

4.3.2 Variabel Kebijakan Desa (X_2)

Variabel kebijakan desa (X_2) terdiri dari 13 item pernyataan, item pertama yaitu Rangkaian Konsep atau rencana dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah desa sudah diinformasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat menggunakan media-media yang ada ($X_{2.1}$), item kedua Proses penyebaran informasi beserta program-program desa sudah menjadi lebih terbuka ($X_{2.2}$), item ketiga yaitu Dengan media-media yang ada bisa memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ($X_{2.3}$), item keempat yaitu Kebijakan Pembangunan fisik desa sudah disertai dengan pemberdayaan sehingga berimplikasi pada upaya peningkatan pendapatan ($X_{2.4}$), item kelima yaitu Adanya pelayanan yang diberikan oleh implementer kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program ($X_{2.5}$), item keenam yaitu Aspek ketepatan layanan digunakan untuk menilai ketepatan waktu dan kesesuaian anggaran penyelenggaraan pelayanan dalam penerapan suatu program kebijakan ($X_{2.6}$), item ketujuh yaitu suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu sangat penting untuk dapat melihat kinerja suatu implementasi kebijakan pemerintah ($X_{2.7}$), item kedelapan yaitu Aspek akuntabilitas digunakan untuk menilai pertanggungjawaban para implementor dalam implementasi

kebijakan (X_{2.8}), item kesembilan yaitu Faktor yang memperlancar proses akuntabilitas adalah pengalaman dan pendidikan para pengelola yang memadai (X_{2.9}), item kesepuluh yaitu komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kepala desa memberikan kemudahan pemahaman terhadap teknis administrasi dan pelaporan (X_{2.10}), item kesebelas yaitu Manajemen yang matang juga akan mengeleminir kegagalan dalam implementasi berbagai program pembangunan di perdesaan (X_{2.11}), item kedua belas yaitu implementasi kebijakan program pemerintah desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (X_{2.12}), item ketiga belas yaitu Kemampuan untuk menggambarkan keadaan masa depan desa yang dipimpin oleh pemerintah desa sudah terlihat pada program-program yang direncanakan dan dilaksanakan (X_{2.13}).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Terhadap Kebijakan Desa (X₂)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata - Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
X _{2.1}	1,11%	3,33%	32,22%	28,89%	34,45%	100%	3,92	Baik
X _{2.2}	4,44%	24,44%	31,11%	35,56%	4,45%	100%	3,11	Cukup Baik
X _{2.3}	-	13,33%	46,67%	35,56%	4,44%	100%	3,31	Cukup Baik
X _{2.4}	1,11%	31,11%	24,45%	40%	3,33%	100%	3,13	Cukup Baik
X _{2.5}	-	12,22%	37,78%	36,67%	13,33%	100%	3,51	Baik
X _{2.6}	-	2,22%	32,22%	63,33%	2,23%	100%	3,66	Baik
X _{2.7}	2,22%	13,33%	37,78%	35,56%	11,11%	100%	3,4	Cukup Baik
X _{2.8}	2,22%	16,67%	33,33%	34,44%	13,34%	100%	3,4	Cukup Baik
X _{2.9}	-	12,22%	36,67%	45,56%	5,55%	100%	3,44	Baik
X _{2.10}	-	15,56%	25,56%	45,55%	13,33%	100%	3,57	Baik
X _{2.11}	-	13,33%	46,67%	35,56%	4,44%	100%	3,31	Cukup Baik
X _{2.12}	3,33%	15,56%	51,11%	23,33%	4,67%	100%	3,14	Cukup Baik

X _{2.13}	3,34%	20%	52,22%	21,11%	3,33%	100%	3,01	Cukup Baik
Rata-Rata	3,38							Cukup Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas untuk Rangkaian Konsep atau rencana dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah desa sudah diinformasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat menggunakan media-media yang ada (X_{2.1}) sebagian besar responden menjawab sangat setuju yaitu 34,45% dengan rata-rata item 3,92 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Proses penyebaran informasi beserta program-program desa sudah menjadi lebih terbuka (X_{2.2}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 3,11% dengan rata-rata item 3,11 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Dengan media-media yang ada bisa memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (X_{2.3}) sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 46,67% dengan rata-rata item 3,31 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk, item (X_{2.4}) Kebijakan Pembangunan fisik desa sudah disertai dengan pemberdayaan sehingga berimplikasi pada upaya peningkatan pendapatan sebagian besar reponden menjawab tidak setuju yaitu 31,11% dengan rata-rata item 3,13 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item (X_{2.5}) Adanya pelayanan yang diberikan oleh implementer kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu

37,78% dengan rata-rata item 3,51 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk (X_{2.6}) Aspek ketepatan layanan digunakan untuk menilai ketepatan waktu dan kesesuaian anggaran penyelenggaraan pelayanan dalam penerapan suatu program kebijakan sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 63,33% dengan rata-rata item 3,66 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item (X_{2.7}) suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu sangat penting untuk dapat melihat kinerja suatu implementasi kebijakan pemerintah sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 37,78% dengan rata-rata item 3,4 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item (X_{2.8}) Aspek akuntabilitas digunakan untuk menilai pertanggungjawaban para implementor dalam implementasi kebijakan sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 34,44% dengan rata-rata item 3,4 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item (X_{2.9}) Faktor yang memperlancar proses akuntabilitas adalah pengalaman dan pendidikan para pengelola yang memadai sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 45,56% dengan rata-rata item 3,44 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item (X_{2.10}) komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kepala desa memberikan kemudahan pemahaman terhadap teknis administrasi dan pelaporan sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 45,55% dengan rata-rata item 3,57 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item (X_{2.11}) Manajemen yang matang juga akan mengeleminir kegagalan dalam implementasi berbagai program pembangunan di perdesaan sebagian besar responden menjawab kurang setuju

yaitu 46,67% dengan rata-rata item 3,31 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item ($X_{2.12}$) implementasi kebijakan program pemerintah desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 51,11% dengan rata-rata item 3,14 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item ($X_{2.13}$) Kemampuan untuk menggambarkan keadaan masa depan desa yang dipimpin oleh pemerintah desa sudah terlihat pada program-program yang direncanakan dan dilaksanakan sebagian besar responden menjawab kurang setuju yaitu 57,22% dengan rata-rata item 3,01 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Kebijakan Desa (X_2) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item ($X_{2.6}$) sebesar 3,66 kriteria penilaian baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item ($X_{2.4}$) yang hanya sebesar 3,13. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 3,38. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa kebijakan desa pada desa Benai berada dalam kategori cukup baik.

4.3.3 Variabel Kelembagaan Desa (X_3)

Variabel Kelembagaan Desa (X_3) terdiri dari 6 item pernyataan, item pertama yaitu Sebuah organisasi dikatakan efektif karena telah tepat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya ($X_{3.1}$), item kedua yaitu kelembagaan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang pembangunan desa dan pengembangan kemitraan sehingga dapat mencapai tujuannya ($X_{3.2}$), item ketiga

yaitu Suatu organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya ($X_{3.3}$), item keempat yaitu Adanya peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan ($X_{3.4}$), item kelima yaitu Integrasi sebuah kelembagaan desa mensyaratkan bahwa tidak bubar meski menghadapi banyak tantangan, baik tantangan berupa fisik dan konflik sosial-budaya ($X_{3.5}$), item keenam yaitu Sebuah Kelembagaan menyesuaikan eksistensinya dengan lingkungan dimana kelembagaan itu diintroduksi ($X_{3.6}$).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kelembagaan Desa (X_3)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
$X_{3.1}$	-	1,11%	37,78%	44,44%	16,67%	100%	3,77	Baik
$X_{3.2}$	-	3,33%	21,11%	51,11%	24,45%	100%	3,97	Baik
$X_{3.3}$	-	2,22%	36,67%	38,89%	22,22%	100%	3,81	Baik
$X_{3.4}$	-	1,11%	27,78%	53,33%	17,78%	100%	3,88	Baik
$X_{3.5}$	-	2,22%	28,89%	54,44%	14,45%	100%	3,81	Baik
$X_{3.6}$	-	1,11%	36,67%	44,44%	17,78%	100%	3,79	Baik
Rata-Rata	3,84							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.9 diatas untuk item Sebuah organisasi dikatakan efektif karena telah tepat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya ($X_{3.1}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 44,44% dengan rata-rata item sebesar 3,77 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item kelembagaan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang pembangunan desa dan pengembangan kemitraan sehingga dapat mencapai tujuannya ($X_{3.2}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu

51,11% dengan rata-rata item sebesar 3,97 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item ($X_{3.3}$) Suatu organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 38,89% dengan rata-rata item sebesar 3,81 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Untuk item Adanya peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan ($X_{3.4}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 53,33% dengan rata-rata item sebesar 3,88 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Integrasi sebuah kelembagaan desa mensyaratkan bahwa tidak bubar meski menghadapi banyak tantangan, baik tantangan berupa fisik dan konflik sosial-budaya ($X_{3.5}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 54,44% dengan rata-rata item sebesar 3,81 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Sebuah Kelembagaan menyesuaikan eksistensinya dengan lingkungan dimana kelembagaan itu diintroduksikan ($X_{3.6}$) sebagian besar responden menjawab setuju 44,44% dengan rata-rata item sebesar 3,79 rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Kelembagaan Desa (X_3) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item ($X_{3.5}$) sebesar 3,81 kriteria penilaian baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item ($X_{3.3}$) yang hanya sebesar 3,81. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 3,84 Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini bahwa kelembagaan desa pada Kecamatan Benai berada dalam kategori baik.

4.3.4 Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) terdiri dari 17 item pernyataan, yang pertama yaitu Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. Dengan pendapatan yang diterima masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi (Y.1), yang kedua yaitu Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima (Y.2), yang ketiga yaitu Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang (Y.3), yang keempat yaitu Dengan pendidikan yang tinggi, kualitas sumber daya manusianya semakin meningkat dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka (Y.4), yang kelima yaitu Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah (Y.5), yang keenam yaitu Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya (Y.6), yang ketujuh yaitu Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya (Y.7), yang kedelapan yaitu kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata dan kesejahteraan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan (Y.8), yang kesembilan yaitu Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya (Y.9), yang kesepuluh yaitu Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak dan layanan

kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, murah dan berkualitas (Y.10), yang kesebelas yaitu Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya (Y.11), yang keduabelas yaitu Pembangunan seharusnya memperhatikan kepentingan dan keterlibatan masyarakat untuk berperan serta baik langsung atau pun tidak langsung guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya, bukan menyingkirkan mereka dalam proses pembangunan tersebut (Y.12), yang ketigabelas yaitu Pembangunan industri adalah salah satu cara yang paling masif dan berdampak baik bagi peningkatan perekonomian masyarakat di satu kawasan tertentu khususnya penduduk asli daerah tersebut (Y.13), yang keempat belas yaitu Banyak pembangunan yang malah menyingkirkan masyarakat setempat karena kurangnya persiapan yang matang dari pemerintah daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan mampu mengikuti proses pembangunan itu sendiri (Y.14), yang kelima belas yaitu Pembangunan dalam kawasan tertentu, keberadaannya memiliki potensi yang kuat sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah disekitarnya (Y.15), yang keenam belas yaitu Pembangunan memerlukan manusia sebagai faktor utama, dan juga pembangunan selalu menggunakan lahan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah karena hampir seluruh kegiatan manusia melibatkan penggunaan lahan, sebagai aktivitas politik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi (Y.16), yang ketujuh belas yaitu Sebagai rangkaian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan harus dilakukan secara

terus menerus dengan melibatkan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek (Y.17).

Adapun tanggapan responden terhadap item-item tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata - Rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
Y.1	1,11%	1,11%	18,89%	48,89%	30%	100%	4,06	Baik
Y.2	-	6,67%	33,33%	51,11%	8,89%	100%	3,62	Baik
Y.3	-	21,11%	33,33%	40%	5,56%	100%	3,3	Cukup Baik
Y.4	-	6,67%	33,33%	36,67%	23,33%	100%	3,77	Baik
Y.5	-	1,11%	36,67%	43,33%	18,89%	100%	3,8	Cukup Baik
Y.6	-	2,22%	33,33%	58,89%	5,56%%	100%	3,68	Cukup Baik
Y.7	-	-	33,33%	58,89%	7,78%	100%	3,74	Baik
Y.8	-	4,44%	38,89%	48,89%	7,78%	100%	3,6	Cukup Baik
Y.9	1,11%	1,11%	18,89%	48,89%	30%	100%	4,06	Baik
Y.10	-	6,67%	33,33%	51,11%	8,89%	100%	3,62	Baik
Y.11	-	21,11%	33,33%	40%	5,56%	100%	3,3	Cukup Baik
Y.12	-	6,67%	33,33%	36,67%	23,33%	100%	3,77	Baik
Y.13	-	1,11%	36,67%	43,33%	18,89%	100%	3,8	Cukup Baik
Y.14	-	2,22%	33,33%	58,89%	5,56%	100%	3,68	Baik
Y.15	-	-	33,33%	58,89%	7,78%	100%	3,74	Baik
Y.16	-	4,44%	38,89%	48,89%	7,78%	100%	3,6	Cukup Baik
Y.17	1,11%	1,11%	18,89%	48,89%	30%	100%	4,06	Baik
Rata-Rata	3,72							Baik

Sumber: Data Primer Olahan, 2020.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas untuk item Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. Dengan pendapatan yang diterima masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi (Y.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 48,89% dengan rata-rata item sebesar 4,06 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat

mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima (Y.2) sebagian besar responden menjawab setuju 51,11% dengan rata-rata item sebesar 3,62 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang (Y.3) sebagian besar responden menjawab setuju 40% dengan rata-rata item sebesar 3,3 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Dengan pendidikan yang tinggi, kualitas sumber daya manusianya semakin meningkat dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka (Y.4) sebagian besar responden menjawab setuju 36,67% dengan rata-rata item sebesar 3,77 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah (Y.5) sebagian besar responden menjawab setuju 43,33% dengan rata-rata item sebesar 3,8 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya (Y.6) sebagian besar responden menjawab setuju 58,89% dengan rata-rata item sebesar 3,68 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya (Y.7) sebagian besar responden menjawab setuju 58,89%

dengan rata-rata item sebesar 3,74 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata dan kesejahteraan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan (Y.8) sebagian besar responden menjawab setuju 48,89% dengan rata-rata item sebesar 3,6 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya (Y.9) sebagian besar responden menjawab setuju 48,89% dengan rata-rata item sebesar 4,06 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak dan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, murah dan berkualitas (Y.10) sebagian besar responden menjawab setuju 51,11% dengan rata-rata item sebesar 3,62 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya (Y.11) sebagian besar responden menjawab setuju 40% dengan rata-rata item sebesar 3,77 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Pembangunan seharusnya memperhatikan kepentingan dan keterlibatan masyarakat untuk berperan serta baik langsung atau pun tidak langsung guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya, bukan menyingkirkan mereka dalam proses pembangunan tersebut (Y.12) sebagian besar responden menjawab setuju 36,67% dengan rata-rata item sebesar 3,77 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Pembangunan industri adalah

salah satu cara yang paling masif dan berdampak baik bagi peningkatan perekonomian masyarakat di satu kawasan tertentu khususnya penduduk asli daerah tersebut (Y.13) sebagian besar responden menjawab setuju 43,33% dengan rata-rata item sebesar 3,8 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Banyak pembangunan yang malah menyingkirkan masyarakat setempat karena kurangnya persiapan yang matang dari pemerintah daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan mampu mengikuti proses pembangunan itu sendiri (Y.14) sebagian besar responden menjawab setuju 58,89% dengan rata-rata item sebesar 3,68 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Pembangunan dalam kawasan tertentu, keberadaannya memiliki potensi yang kuat sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah disekitarnya (Y.15) sebagian besar responden menjawab setuju 58,89% dengan rata-rata item sebesar 3,74 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Untuk item Pembangunan memerlukan manusia sebagai faktor utama, dan juga pembangunan selalu menggunakan lahan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah karena hampir seluruh kegiatan manusia melibatkan penggunaan lahan, sebagai aktivitas politik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi (Y.16) sebagian besar responden menjawab setuju 48,89% dengan rata-rata item sebesar 3,6 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori cukup baik. Untuk item Sebagai rangkaian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan harus dilakukan secara terus menerus dengan melibatkan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek

(Y.17) sebagian besar responden menjawab setuju 48,89% dengan rata-rata item sebesar 4,06 artinya rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada kategori baik.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) dalam penelitian ini, item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item (Y.6) dan (Y.7) sebesar 3,68 dan 3,74 kriteria penilaian baik dan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu item (Y.4) dan (Y.12) yang hanya sebesar 3,77. Maka diperoleh rata-rata keseluruhan item sebesar 3,72. Artinya rata-rata responden yang menjawab dalam penelitian ini pada variabel Kesejahteraan Masyarakat pada Kecamatan Benai berada dalam kategori baik.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai koefisien antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis *corrected item-total correlation*. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka dinyatakan valid.
- 2) Bila $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$, maka dinyatakan tidak valid.

Adapun hasil pengujian validitas instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini:

Tabel 4.11
Uji Validitas

No	Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X₁)	X _{1.1}	0,416	0,209	Valid
		X _{1.2}	0,529	0,209	Valid
		X _{1.3}	0,567	0,209	Valid
		X _{1.4}	0,452	0,209	Valid
		X _{1.5}	0,426	0,209	Valid
		X _{1.6}	0,425	0,209	Valid
		X _{1.7}	0,580	0,209	Valid
		X _{1.8}	0,504	0,209	Valid
		X _{1.9}	0,250	0,209	Valid
		X _{1.10}	0,330	0,209	Valid
		X _{1.11}	0,567	0,209	Valid
		X _{1.12}	0,452	0,209	Valid
		X _{1.13}	0,261	0,209	Valid
		X _{1.14}	0,288	0,209	Valid
		X _{1.15}	0,259	0,209	Valid
		X _{1.16}	0,244	0,209	Valid
		X _{1.17}	0,171	0,209	Valid
		X _{1.18}	0,271	0,209	Valid
2	Kebijakan Desa (X₂)	X _{2.1}	0,454	0,209	Valid
		X _{2.2}	0,294	0,209	Valid
		X _{2.3}	0,732	0,209	Valid
		X _{2.4}	0,632	0,209	Valid
		X _{2.5}	0,430	0,209	Valid
		X _{2.6}	0,288	0,209	Valid
		X _{2.7}	0,514	0,209	Valid
		X _{2.8}	0,296	0,209	Valid
		X _{2.9}	0,415	0,209	Valid
		X _{2.10}	0,395	0,209	Valid
		X _{2.11}	0,732	0,209	Valid
		X _{2.12}	0,290	0,209	Valid
		X _{2.13}	0,416	0,209	Valid
3	Kelembagaan Desa (X₃)	X _{3.1}	0,797	0,209	Valid
		X _{3.2}	0,780	0,209	Valid
		X _{3.3}	0,735	0,209	Valid
		X _{3.4}	0,780	0,209	Valid
		X _{3.5}	0,676	0,209	Valid
		X _{3.6}	0,583	0,209	Valid
4	Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Y.1	0,698	0,209	Valid
		Y.2	0,616	0,209	Valid
		Y.3	0,556	0,209	Valid
		Y.4	0,725	0,209	Valid
		Y.5	0,695	0,209	Valid
		Y.6	0,628	0,209	Valid
		Y.7	0,503	0,209	Valid

		Y.8	0,629	0,209	Valid
		Y.9	0,698	0,209	Valid
		Y.10	0,616	0,209	Valid
		Y.11	0,556	0,209	Valid
		Y.12	0,725	0,209	Valid
		Y.13	0,695	0,209	Valid
		Y.14	0,628	0,209	Valid
		Y.15	0,503	0,209	Valid
		Y.16	0,629	0,209	Valid
		Y.17	0,698	0,209	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS, 2020.

Pada tabel 4.11 uji validitas menunjukan bahwa r_{hitung} variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat lebih besar dibanding r_{tabel} . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dan item yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat dinyatakan valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas adalah *Cronbach Alpha* dengan cara membandingkan nilai *alpha* dengan standarnya. Koefisien *Cronbach Alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrumen. Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitas.

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X_1)	0,701	0,60	Reliabel
2	Kebijakan Desa (X_2)	0,654	0,60	Reliabel
3	Kelembagaan Desa (X_3)	0,819	0,60	Reliabel
4	Kesejahteraan Masyarakat (Y)	0,907	0,60	Reliabel

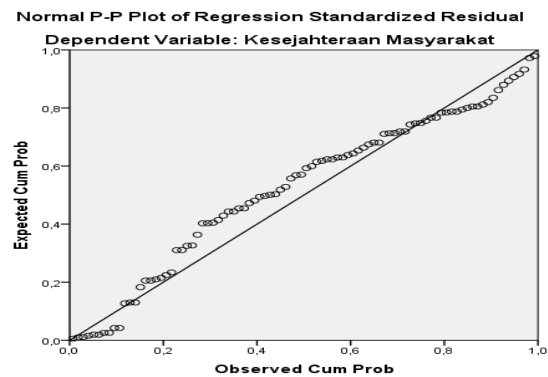
Sumber: Data Olahan SPSS, 2020.

Pada tabel 4.12 uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

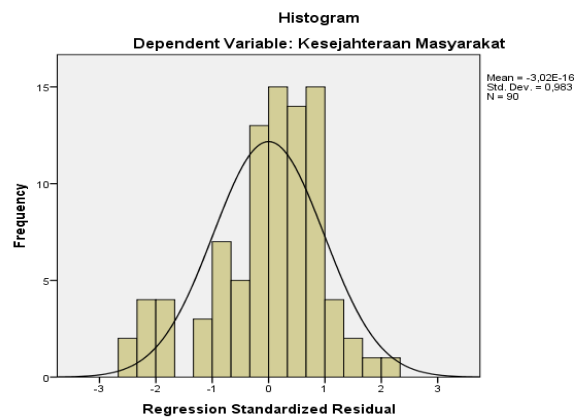
4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui metode grafik normal P-plot dan grafik histogram.



(Gambar 4.1 Uji Normalitas)



(Gambar 4.2 Grafik Histogram)

Berdasarkan tampilan grafik normal P-plot di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Sedangkan pada grafik histogram terlihat bahwa grafik memberikan pola distribusi yang normal.

4.5.2 Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (dependen). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolineritas didalam regresi dapat dilihat dari nilai *toleran* dan *variance inflation factor (VIF)*.

Tabel 4.13
Uji Multikolineritas

<i>Collinearity Statistics</i>			
Variabel	Toleran	VIF	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X_1)	0,876	1,141	Bebas Multikolineritas
Kebijakan Desa (X_2)	0,823	1,215	Bebas Multikolineritas
Kelembagaan Desa (X_3)	0,809	1,236	Bebas Multikolineritas

Dependen Variabel: Kesejahteraan Masyarakat.

Sumber: Data Olahan SPSS, 2020.

Pada tabel 4.13 hasil perhitungan nilai VIF pada Full model menunjukan bahwa tidak ada nilai VIF > 10 sehingga mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa pada full model regresi tidak terdapat masalah multikolineritas.

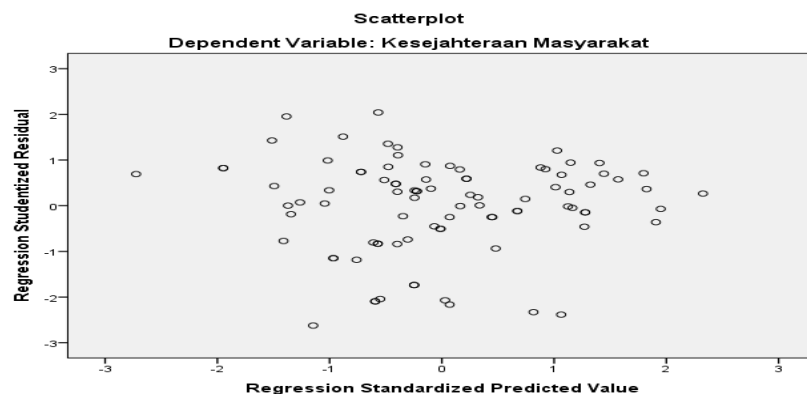
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain sama maka disebut *homoskedastisitas*. Sebaliknya, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak sama maka disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara prediksi nilai variabel terikat dengan residualnya. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghozali (2016: 134) yaitu:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



(Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas)

Hasil yang ditampilkan pada gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan bawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk

memprediksi dependen berdasarkan masukan variabel-variabel independen yang digunakan.

4.5.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi, melalui model tabel *durbin watson*. Dimana secara umum dapat diambil patokan sebagai berikut (Santoso, 2004):

- Jika angka D-W dibawah -2, berarti autokorelasi positif.
- Jika angka D-W diatas +2, berarti autokorelasi negatif.
- Jika angka D-W diantara -2 sampai dengan +2, berarti tidak ada autokorelasi.

Tabel 4.14
Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin Watson	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X_1)	2,049	Tidak Ada Autokorelasi
Kebijakan Desa (X_2)		
Kelembagaan Desa (X_3)		

Dependen Variabel: Kesejahteraan Masyarakat.

Sumber: Data Output SPSS, 2020.

Dari tabel 4.14 di atas, menunjukan bahwa nilai Durbin Watson (DW) pada variabel dependen menunjukan nilai 1,901 dengan berkisar antara -2 sampai dengan +2, berarti autokorelasi tidak ada pada variabel regresi atau independen.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

4.6.1 Persamaan Regresi

Penelitian ini mempunyai hipotesis yang diuji dengan menggunakan regresi berganda. Pengujian hipotesis pertama tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X_1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y). Kedua Kebijakan Desa (X_2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y). Ketiga Kelembagaan Desa (X_3) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y). Berdasarkan pada pengolahan data menggunakan software SPSS versi 23 maka didapatkan suatu model regresi berganda berikut:

Tabel 4.15
Koefisien Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	3,237	8,296	
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X_1)	0,596	0,199	0,263
Kebijakan Desa (X_2)	0,350	0,149	0,213
Kelembagaan Desa (X_3)	0,964	0,230	0,383

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat.

Dari tabel di atas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 3,237 + 0,596X_1 + 0,350X_2 + 0,964X_3 + e$$

Adapun penjelasan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

a = Konstanta = 3,237.

Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 3,237 besarnya Kesejahteraan Masyarakat (Y). Apabila Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X_1), Kebijakan Desa (X_2), Kelembagaan Desa (X_3),) adalah konstan, maka Kesejahteraan Masyarakat (Y) sebesar 3,237.

β_1 = Koefisien regresi X_1 = 0,596

Koefisien regresi pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X_1) adalah sebesar 0,596. Artinya adalah jika Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X_1) naik satu satuan, maka Kesejahteraan Masyarakat (Y) akan naik sebesar 0,596 dengan asumsi variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah berpengaruh positif. Atau dengan kata lain, tingginya Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

β_2 = Koefisien regresi X_2 = 0,350

Koefisien regresi pada variabel Kebijakan Desa (X_2) adalah sebesar = 0,350. Artinya adalah Kebijakan Desa (X_2) naik satu satuan, maka Kesejahteraan Masyarakat (Y) akan naik sebesar 0,350. dengan asumsi variabel Kebijakan Desa adalah berpengaruh positif. Atau dengan kata lain, tingginya Kebijakan Desa dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

β_3 = Koefisien regresi X_3 = 0,964

Koefisien regresi pada variabel Kelembagaan Desa (X_3) adalah sebesar = 0,964. Artinya adalah Kelembagaan Desa (X_3) naik satu satuan, maka Kesejahteraan Masyarakat (Y) akan naik sebesar 0,964. dengan asumsi

variabel kelembagaan desa adalah berpengaruh positif. Atau dengan kata lain, tingginya kelembagaan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Uji t

Uji t parsial dalam analisis regresi analisis berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini uji t yang dihasilkan:

Tabel 4.16
Nilai Koefisien t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	3,237	8,296		0,390	0,697
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X_1)	0,596	0,199	0,263	2,994	0,004
Kebijakan Desa (X_2)	0,350	0,149	0,213	2,352	0,021
Kelembagaan Desa (X_3)	0,964	0,230	0,383	4,188	0,000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat
Sumber: Data Olahan SPSS, 2020.

Untuk mencari t tabel dengan $df = n-2$, taraf nyata 5% dapat dengan menggunakan tabel statistic. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan t tabel.

Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- a. Jika t hitung $> t$ tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.
- b. Jika t hitung $< t$ tabel, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Tabel 4.17
Uji t

Variabel	t Hitung	t Tabel	Nilai Signifikan	Keterangan
X_1	2,994	1,987	$0,004 < 0,050$	H_0 ditolak dan H_1 diterima
X_2	2,352	1,987	$0,021 < 0,050$	H_0 ditolak dan H_1 diterima
X_3	4,188	1,987	$0,000 < 0,050$	H_0 ditolak dan H_1 diterima

Sumber: Data Olahan SPSS, 2020.

1) Hipotesis Pertama

Berdasarkan tabel 4.17 didapat nilai t hitung 2,994 dan signifikan 0,004.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 ; 90 - 4$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 86$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,987.

Nilai t hitung 2,994 $> t$ tabel 1,987 dan nilai signifikan $0,004 < 0,050$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).

2) Hipotesis Kedua

Berdasarkan tabel 4.17 didapat nilai t hitung 2,352 dan signifikan 0,021.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 ; 90- 4$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 86$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,987.

Nilai t hitung $2,352 > t \text{ tabel } 1,987$ dan nilai signifikan $0,021 < 0.050$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang artinya Kebijakan Desa (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).

3) Hipotesis Ketiga

Berdasarkan tabel 4.17 didapat nilai t hitung 4,188 dan signifikan 0,000.

Kemudian t tabel (tarif nyata 5%) dapat diperoleh dengan persamaan yaitu:

$$t \text{ tabel} = \alpha/2 ; n - k$$

$$t \text{ tabel} = 0,05/2 ; 90-4$$

$$t \text{ tabel} = 0,025 ; 86$$

Dicari di t tabel pada distribusi nilai t tabel sebesar 1,987.

Nilai t hitung $4,188 > t \text{ tabel } 1,987$ dan nilai signifikan $0,000 < 0.050$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, yang artinya Kelembagaan Desa (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).

4.8 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R-square menunjukkan persentase seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Berikut ini koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan:

Tabel 4.18
Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,646 ^a	0,417	0,397	6,314260	2,049

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa , Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa.

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan tabel 4.18 di atas nilai Untuk menghitung besarnya pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X_1), Kebijakan Desa (X_2), Kelembagaan Desa (X_3), terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) dengan menggunakan angka R Square (angka korelasi yang dikuadratkan). Angka R Square disebut juga *Koefisiensi Determinasi* (KD). Besarnya angka Koefisiensi Diterminasi dalam perhitungan di atas ialah sebesar 0,397 atau sama dengan 39,7% (Rumus untuk menghitung koefisiensi determinasi *Model Summary*^b, ialah $Adjusted\ r^2 \times 100\%$). Angka tersebut mempunyai arti bahwa, besarnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X_1), Kebijakan Desa (X_2), Kelembagaan Desa (X_3), terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) adalah 39,7% sedangkan 60,3% sisanya yaitu dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.9 Pembahasan Hasil Penelitian

4.9.1 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kecamatan Benai.

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Ini berarti bahwa semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Kecamatan Benai maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kecamatan Benai. Akuntabilitas pengelolaan keuangan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini ditunjukkan t hitung 2,994 > t tabel 1,987 dan nilai signifikan $0,004 < 0,050$, maka menunjukkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) dapat disimpulkan H_1 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Kecamatan Benai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, jika Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa pada desa di Kecamatan Benai baik maka kesejahteraan masyarakat di Benai juga tinggi. Berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 11 Permendesa No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dimaksud untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. dengan adanya Alokasi Dana Desa desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan. Alokasi

Dana Desa tersebut akan terus mendorong otonomi desa sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa harus mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29, 30, 33 dan 34 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Perencanaan

- a) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b) Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di sampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan

2. Pelaksanaan

- a) Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.
- b) Pelaksana kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- c) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- d) Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dengan diverifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran.

3. Penatausahaan

- a) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- b) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- c) Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.
- d) Bendahara desa mepertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- e) Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada kepala desa.
- f) Saat ini penatusahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama sistim keuangan desa (siskeudes).

4. Pelaporan

- a) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota
- b) Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan
- c) Laporan akhir tahun dilaporkan disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

- a) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan
- c) Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Permedagri 20 tahun 2018 yang mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa yaitu dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa tidak

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

4.9.2 Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kecamatan Benai.

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Kebijakan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Ini berarti bahwa semakin baik kebijakan desa di Kecamatan Benai maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kecamatan Benai. Kebijakan desa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini ditunjukkan t hitung 2,352 > t tabel 1,987 dan nilai signifikan $0,021 < 0.050$, maka menunjukkan Kebijakan Desa (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) dapat disimpulkan H_1 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Kecamatan Benai Kebijakan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, jika Kebijakan Desa di Kecamatan Benai tinggi maka kesejahteraan masyarakat di benai juga naik. Kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukumpun memiliki wewenang tersebut meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Secara undang-undang, kebijakan formal di level desa tertuang dalam bentuk peraturan desa. secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah

kota/kabupaten.

Meskipun demikian desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus. Kebijakan pemerintah desa harus optimal dan berfungsi serta tugas kebijakan desa harus berjalan dengan baik. Program-program yang sudah dibuat oleh aparatur desa semuanya harus dilaksanakan seperti penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. pemerintah desa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendukung sepenuhnya kegiatan program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuannya yaitu membawa masyarakat kearah pembangunan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Purwanto (2015:106-110) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel kebijakan desa yaitu (Akses, bias, ketepatan pelayanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan) indikator ini juga digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu (Dura, 2016). Indikator tersebut antara lain:

1. Akses

Akses mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti gender, etnisitas, agama dan afiliasi politik. Akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

2. Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

3. Ketepatan Pelayanan

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam penerapan kebijakan ini suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.

4. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluar kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

5. Kesesuaian program dengan kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

Hal ini sesuai dengan teori (Tachjan: 2006) yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa pogram, peraturan dan kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila didukung oleh faktor yaitu ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang kebutuhan publik serta didorong oleh dukungan responsibilitas mayarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah termasuk taat kepada hukum dan peraturan. p

. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) menyimpulkan bahwa Kebijakan desa berpengaruh secara signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) menyatakan bahwa Kebijakan Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

4.9.3 Pengaruh Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kecamatan Benai.

Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Kelembagaan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Ini berarti bahwa semakin baik kelembagaan desa di Kecamatan Benai maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kecamatan Benai. Kelembagaan desa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini ditunjukkan t hitung $4,188 > t$ tabel $1,987$ dan nilai signifikan $0,000 < 0.050$, maka menunjukkan Kelembagaan Desa (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) dapat disimpulkan H_1 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Kecamatan Benai Kelembagaan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, jika Kelembagaan Desa di Kecamatan Benai tinggi maka kesejahteraan masyarakat di benai juga naik.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diatur mengenai kelembagaan Desa. Lembaga Desa dapat dijadikan sebagai wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa yang ikut serta dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. dengan adanya lembaga, sebuah desa dapat mencapai tujuannya. Salah satu tujuannya yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti memberikan pelayanan dan pemberdayaan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kelembagaan desa adalah sebagai berikut (Dura,2016):

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Sebuah Kelembagaan/Organisasi dikatakan efektif jika telah tepat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian tujuan dalam penelitian ini dilihat dari seberapa besar tercapainya tujuan lembaga, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan kelembagaan/organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dalam penelitian ini dilihat dari adanya peran aktif anggota sebuah kelembagaan dalam mendukung pembangunan desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa agar terwujudnya kesejahteraan.

3. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu kelembagaan/organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi. Integrasi dalam penelitian ini dilihat dari adanya sosialisasi yang

dilakukan oleh kelembagaan desa tentang pembangunan kepada masyarakat, pengembangan konsensus, dan juga komunikasi antara pemerintahan desa, BPD, LPMD dan masyarakat desa.

Hal ini sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Lembaga Desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintah desa. Tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowerment) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dura (2016) menyimpulkan bahwa Kelembagaan desa berpengaruh secara signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) menyatakan bahwa kelembagaan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X_1), Kebijakan Desa (X_2), Kelembagaan Desa (X_3), terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) di Desa Kecamatan Benai. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan terhadap permasalahan dengan menggunakan hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Kecamatan Benai dengan pengaruh sebesar 0,596 atau 59,6%.
2. Kebijakan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Kecamatan Benai dengan pengaruh sebesar 0,350 atau 35,0%.
3. Kelembagaan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Kecamatan Benai dengan pengaruh sebesar 0,964 atau 96,4%.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi aparat desa seharusnya lebih bijak lagi dalam menggunakan dana alokasi desa agar dana tersebut lebih bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana desa agar masyarakat merasakan kesejahteraan di desa.
2. Sosialisasi mengenai anggaran dana desa harus dilakukan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik yang pada akhirnya

masyarakat akan menjadi lebih mudah untuk berpartisipasi dalam melaksanakan anggaran dana desa sesuai dengan peranan dan fungsinya masing-masing.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel independen lainnya.
4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas objek penelitian dan menambah sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badrudin. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Chabib, Sholeh dan Rochmansjah, Heru (2014), *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sujarweni 2015: Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 2002. *Menyoal(kembali) Otonomi Desa*, Yogyakarta.
- Supomo dan Bambang, 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, 2015:27, *Asas pengelolaan keuangan desa*, Bandung
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jurnal/Skripsi:

- Justita Dura. 2016, *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugkalah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*.
- Vica Mayela Laurentya. 2017. Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Dana APBDesa dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidiarjo)
- Novianti Ruru. 2017. Analisi Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan (Studi Kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)
- Fadhil Ashar. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhdap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di desa Uekuli Kecamtn Tojo Una-

Una)

- Netri Rahmelia. 2019. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti)
- Vita Faizah. 2019. Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Pokak Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)
- Hendriyono. 2018. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)
- Emi Tahir. 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat studi Kasus pada Desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi)
- Rina Indrawati. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang)
- Winda Winardi, 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa Terhadap kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin)
- Krisherdian, R.A. 2015. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Skripsi. Universitas Jember.
- Mardiasmo, 2006, (Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1 Mei), Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Yuli Kurniawati, 2017. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Anonim.1974. Undang-undang Republika Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: 2003

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Website:

Badan Pusat Statistik.2019. Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Benai, 2018 <https://kuansingkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YzVhZTcwNDg0ODQ3ODE4MzVhY2ZkMjZm&xzmn=aHR0cHM6L>

Badan Pusat Statistik.2019 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Benai, 2018 <https://kuansingkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YzVhZTcwNDg0ODQ3ODE4MzVhY2ZkMjZm&xzmn=aHR0cHM6L>

<http://kuansingterkini.com/berita/cetak/6896/2016/12/14/tahun-2017,-desa-di-kuansing-terima-dana-add-dari-pusat-sebesar-rp-740-hingga-rp> Kepala BPMPKB Kuansing, Irwandi. (ktc) Rabu, 14 Desember 2016 - 06:29:00 WIB

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf> Jakarta, November 2017 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

<http://www.jurnalmediaindonesia.com/2018/12/diduga-ada-penyelewengan-add-dalam.html>

LAMPIRAN 1

KUESIONER

“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi)”

I. Petunjuk Pengisian

1. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner dimohonkan kepada responden terlebih dahulu mengisi identitas sesuai dengan formulir isian yang disediakan.
2. Bacalah pertanyaan secara teliti dan berikan tanda *check list* (✓) pada salah satu alternative jawaban yang dianggap benar.
3. Dimohonkan untuk mencoba menganalisis pertanyaan secara intensif, dan jawaban sesuai dengan pendapat sendiri tanpa paksaan pihak manapun, karena tidak ada pertanyaan yang benar atau salah.
4. Dimohonkan untuk tidak mendiskusikan pertanyaan dengan pihak lain.

II. Identitas Responden

1. Nama :
(Boleh tidak diisi)
2. Nama Desa :
.....
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki
☐ Perempuan
4. Umur : ☐ ≤ 35 Tahun
☐ 36-50 Tahun
☐ >50 Tahun
5. Pendidikan Terakhir : ☐ SMA
☐ S1
☐ S2
6. Lama Masa Kerja : ☐ 1-5 Tahun
☐ >5 Tahun

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *Check List* (✓) Pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu .

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

ss = Sangat Setuju

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Perencanaan						
1	Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.					
2	Sekretrais desa menyampaikan Reperdes APBDesa Kepada Kepala Desa.					
3	Raperdes APBDesa disampaikan Kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.					
4	Raperdes APBDesa disepakati secara bersama					
5	Raperdes APBDesa yang telah disepakati, lalu disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi.					
6	Hasil evaluasi yang dilakukan oleh bupati/walikota ditindaklanjuti oleh kepala desa untuk diperbaiki untuk menetapkan Raperdes APBDesa mejadi peraturan desa.					
Pelaksanaan						
7	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.					
8	Bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.					
9	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.					
10	Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.					

11	Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya dan diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian disahkan oleh kepala desa..					
Penatausahaan						
12	Penetausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Pencatatan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan aplikasi bernama Sistem keuangan Desa (Siskeudes) atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.					
13	Bendahara desa mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa					
Pelaporan						
14	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati atau Walikota					
15	Kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/Walikota.					
16	Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.					

Lanjutan kuisioner Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa

PertanggungJawaban					
17	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.				
18	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.				

2. Kebijakan Desa

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *Check List* (√) Pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu .

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

ss = Sangat Setuju

KS = Kurang Setuju

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Akses						
1	Rangkaian Konsep atau rencana dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah desa sudah diinformasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat menggunakan media-media yang ada.					
2	Proses penyebaran informasi beserta program-program desa sudah menjadi lebih terbuka.					
3	Dengan media-media yang ada bisa memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah					
Bias						
4	Kebijakan Pembangunan fisik desa sudah disertai dengan pemberdayaan sehingga berimplikasi pada upaya peningkatan pendapatan					
5	Adanya pelayanan yang diberikan oleh implementer kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.					

Ketepatan Pelayanan					
6	Aspek ketepatan layanan digunakan untuk menilai ketepatan waktu dan kesesuaian anggaran penyelenggaraan pelayanan dalam penerapan suatu program kebijakan				
7	suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu sangat penting untuk dapat melihat kinerja suatu implementasikebijakan pemerintah				

Akuntabilitas					
8	Aspek akuntabilitas digunakan untuk menilai pertanggungjawaban para implemtor dalam mplementasi kebijakan				
9	Faktor yang memperlancar proses akuntabilitas adalah pengalaman dan pendidikan para pengelola yang memadai				
10	komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kepala desa memberikan kemudahan pemahaman terhadap teknis administrasi dan pelaporan.				
11	Manajemen yang matang juga akan mengeleminir kegagalan dalam implementasi berbagai program pembangunan di perdesaan				
Kesesuaian program dan kebutuhan					
12	implementasi kebijakan program pemerintah desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat				
13	Kemampuan untuk menggambarkan keadaan masa depan desa yang dipimpin oleh pemerintah desa sudah terlihat pada program-program yang direncanakan dan dilaksanakan				

3. Kelembagaan Desa

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *Check List* (√) Pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu .

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

ss = Sangat Setuju

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
----	------------	----	---	----	----	-----

Pencapaian Tujuan						
1	Sebuah organisasi dikatakan efektif karena telah tepat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya					
2	kelembagaan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang pembangunan desa dan pengembangan kemitraan sehingga dapat mencapai tujuannya.					
Adaptasi						
3	Suatu orgnisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya					
4	Adanya peran aktif kelembagaan desa dalam mendukung pembengunan					
Integritas						
5	Integrasi sebuah kelembagaan desa mensyaratkan bahwa tidak bubar meski menghadapi banyak tantangan, baik tantangan berupa fisik dan konflik <u>sosial-budaya</u> .					
6	Sebuah Kelembagaan menyesuaikan eksistensinya dengan lingkungan dimana kelembagaan itu diintroduksi.					

4. K
esejah
teraan
Masya
rakat

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *Check List* (√) Pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu .

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

S = Setuju

ss = Sangat Setuju

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Tingkat Pendapatan						
1	Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. Dengan pendapatan yang diterima masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.					

2	Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.					
Tingkat Pendidikan						
3	Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang.					
4	Dengan pendidikan yang tinggi, kualitas sumber daya manusianya semakin meningkat dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka.					
5	Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah.					

Lanjutan Kuesioner Kesejahteraan Masyarakat

6	Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya					
7	Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.					

Tingkat Kesehatan						
8	kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata dan kesejahteraan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan.					

9	Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya.					
10	Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak dan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, murah dan berkualitas.					
11	Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.					
Tingkat Pembangunan						
12	Pembangunan seharusnya memperhatikan kepentingan dan keterlibatan masyarakat untuk berperan serta baik langsung atau pun tidak langsung guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya, bukan menyingkirkan mereka dalam proses pembangunan tersebut.					
13	Pembangunan industri adalah salah satu cara yang paling masif dan berdampak baik bagi peningkatan perekonomian masyarakat di satu kawasan tertentu khususnya penduduk asli daerah tersebut.					

Lanjutan Kuesioner Kesejahteraan Masyarakat

14	Banyak pembangunan yang malah menyingkirkan masyarakat setempat karena kurangnya persiapan yang matang dari pemerintah daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan mampu mengikuti proses pembangunan itu sendiri.					
15	Pembangunan dalam kawasan tertentu, keberadaannya memiliki potensi yang kuat sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah disekitarnya.					

16	Pembangunan memerlukan manusia sebagai faktor utama, dan juga pembangunan selalu menggunakan lahan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah karena hampir seluruh kegiatan manusia melibatkan penggunaan lahan, sebagai aktivitas politik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi.					
17	Sebagai rangkaian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan harus dilakukan secara terus menerus dengan melibatkan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek.					

LAMPIRAN 2

TABULASI DATA PENELITIAN

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (X_1)

no	X1																		jumlah
	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14	p15	p16	p17	p18	
1	3	4	4	2	3	3	4	3	3	4	4	2	3	4	4	3	3	4	33
2	3	2	2	3	5	3	3	2	4	4	2	3	2	4	3	3	3	3	31
3	5	5	5	2	5	4	5	4	4	5	5	2	4	5	4	4	4	5	44
4	3	2	2	3	4	5	4	2	4	4	2	3	5	4	4	4	3	4	33
5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	2	2	4	4	41
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	40
7	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	36
8	4	5	4	3	5	3	4	4	4	4	4	3	4	3	1	2	2	3	40
9	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	5	3	2	3	3	3	35
10	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	2	3	3	3	38
11	5	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	5	3	4	4	2	2	36
12	5	5	5	3	3	4	3	3	4	4	5	3	3	4	2	2	3	3	39
13	5	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	37
14	3	2	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	2	32
15	4	3	5	3	4	3	4	3	3	4	5	3	5	4	4	4	3	3	36

16	4	3	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	3	4	4	4	3	3	41
17	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	5	3	3	4	3	4	34
18	3	3	4	3	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	37
19	3	4	4	4	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	3	38
20	3	4	4	3	5	3	4	2	5	5	4	3	3	3	4	4	3	3	38
21	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	4	3	4	2	3	44
22	5	5	5	2	2	2	5	4	3	3	5	2	2	4	3	4	3	3	36
23	4	3	3	3	3	4	4	4	5	4	3	3	3	4	3	4	3	3	37
24	4	4	3	3	3	4	3	5	5	4	3	3	3	4	4	5	3	3	38
25	3	4	2	3	4	4	4	5	4	3	2	3	3	5	3	3	1	1	36
26	5	5	4	4	5	5	4	3	4	5	4	4	4	4	2	2	3	5	44
27	3	3	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	2	2	2	2	41
28	3	3	3	4	5	5	5	5	4	5	3	4	2	4	2	2	4	3	42
29	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	3	2	2	3	46
30	3	3	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	2	44
31	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	3	4	4	4	2	2	40
32	4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	3	2	4	4	4	4	41
33	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	5	5	2	2	5	2	38
34	4	4	4	5	5	4	3	3	4	5	4	5	5	5	4	4	2	2	41
35	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	40
36	3	3	3	2	5	4	3	3	3	4	3	2	4	4	3	3	2	3	33
37	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	1	3	3	35
38	3	4	4	2	5	5	4	4	4	5	4	2	4	5	4	5	4	4	40
39	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	2	2	35
40	3	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	2	5	4	4	41
41	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	5	4	3	3	3	3	35
42	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	5	3	4	3	3	3	36
43	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	2	35
44	5	4	5	3	5	5	4	5	3	4	5	3	4	3	3	3	2	3	43
45	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	35
46	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	2	1	36
47	5	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	1	1	1	1	37
48	5	5	5	2	3	3	4	3	2	4	5	2	4	4	2	4	3	3	36
49	5	4	4	4	4	4	3	3	3	2	4	4	4	3	3	4	4	3	36
50	4	3	4	4	4	3	3	2	3	4	4	4	5	3	3	2	2	4	34
51	4	3	5	4	4	3	3	4	3	2	5	4	3	4	4	5	2	4	35
52	4	3	5	2	2	4	5	4	5	2	5	2	5	4	4	4	3	4	36

53	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	5	3	4	3	40
54	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	4	4	2	2	3	3	32
55	4	4	3	3	2	4	3	3	3	5	3	3	3	4	2	2	3	3	34
56	3	4	5	4	4	3	4	4	2	3	5	4	3	3	4	3	2	3	36
57	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	2	4	3	3	3	4	38
58	5	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	37
59	5	4	4	3	2	4	5	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	38
60	5	4	4	4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	42
61	5	3	5	4	4	2	5	3	4	5	5	4	4	5	3	4	3	3	40
62	5	5	5	4	4	5	5	2	3	4	5	4	4	5	4	4	4	4	42
63	3	3	4	2	2	4	4	3	3	5	4	2	4	3	3	3	3	3	33
64	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	4	3	3	3	4	30
65	5	5	5	4	4	5	5	4	3	3	5	4	4	5	5	4	5	4	43
66	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	3	4	44
67	4	4	5	3	3	5	4	4	3	5	5	3	3	4	4	5	5	5	40
68	3	5	5	3	4	5	5	5	3	2	5	3	3	3	5	5	5	5	40
69	3	5	5	3	3	5	5	4	3	2	5	3	5	4	5	5	5	5	38
70	5	4	3	3	2	4	3	3	3	5	3	3	5	5	4	4	4	4	35
71	3	4	4	2	3	3	4	3	3	2	4	2	5	4	5	5	5	4	31
72	2	4	4	3	3	4	5	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	36
73	5	5	2	2	2	4	2	2	4	3	2	2	3	4	3	4	3	3	31
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
75	3	4	3	4	5	3	5	3	5	5	3	4	4	3	5	5	5	5	40
76	5	5	4	4	4	2	4	3	3	5	4	4	3	3	4	4	3	5	39
77	3	2	2	5	4	4	3	5	4	4	2	5	4	4	3	3	4	4	36
78	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	34
79	3	2	2	3	5	3	3	2	4	4	2	3	2	4	3	3	3	3	31
80	5	5	5	2	5	4	5	4	4	5	5	2	4	5	4	4	4	5	44
81	3	2	2	3	4	5	4	2	4	4	2	3	5	4	4	4	3	4	33
82	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	2	2	4	4	41
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	40
84	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	36
85	4	5	4	3	5	3	4	4	4	4	4	3	4	3	1	2	2	3	40
86	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	5	3	2	3	3	3	35
87	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	2	3	3	3	38
88	5	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	5	3	4	4	2	2	36
89	5	5	5	3	3	4	3	3	4	4	5	3	3	4	2	2	3	3	39

90	5	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	37
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Kebijakan Desa (X₂)

no	X2													jumlah
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	
1	5	2	3	2	2	4	4	4	4	4	3	4	4	45
2	3	3	2	2	2	4	5	5	2	2	2	2	3	37
3	5	4	5	2	2	3	3	3	5	2	5	3	2	44
4	4	4	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	2	41
5	4	2	2	3	3	4	4	2	2	3	2	4	3	38
6	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	3	50
7	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	50
8	3	1	3	3	3	4	3	5	3	3	3	3	5	42
9	4	2	4	2	4	4	4	4	4	2	4	3	4	45
10	3	2	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	43
11	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	43
12	3	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	41
13	3	4	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	36
14	3	4	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	37
15	5	4	4	5	4	4	2	2	4	5	4	3	2	48
16	5	4	4	4	3	3	5	4	4	4	4	2	3	49
17	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	47
18	5	3	2	2	4	4	2	5	2	2	2	3	2	38
19	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	51
20	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	53
21	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	47
22	2	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	45
23	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	49
24	5	4	3	2	4	4	4	3	3	2	3	3	3	43
25	4	3	3	2	4	3	3	2	3	2	3	3	3	38
26	4	2	3	2	4	4	3	3	3	4	3	3	3	41
27	5	2	4	4	4	4	5	5	3	4	4	1	3	48

28	5	2	4	4	5	3	5	3	4	5	4	5	3	52
29	4	3	3	1	5	4	1	1	4	5	3	2	1	37
30	5	4	5	4	5	4	5	3	4	5	5	3	5	57
31	4	4	2	2	4	4	2	2	5	3	2	3	2	39
32	3	4	3	3	5	5	3	4	5	3	3	2	3	46
33	5	2	4	5	5	4	4	5	4	4	4	2	3	51
34	5	4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	2	42
35	3	4	2	2	3	3	2	2	4	3	2	2	2	34
36	5	3	3	2	5	4	4	4	5	4	3	2	4	48
37	3	3	2	2	5	4	2	5	4	4	2	3	2	41
38	5	4	5	2	3	3	2	2	2	5	5	3	2	43
39	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	42
40	4	2	3	4	3	4	2	4	2	4	3	4	3	42
41	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	2	3	44
42	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	50
43	3	3	2	2	3	4	3	2	4	4	2	3	2	37
44	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	49
45	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	41
46	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	39
47	3	1	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	44
48	3	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	1	3	39
49	3	3	4	3	5	5	3	2	4	4	4	1	4	45
50	4	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	1	34
51	5	4	4	5	3	4	1	1	4	5	4	3	1	44
52	5	4	4	4	2	3	5	4	4	3	4	4	3	49
53	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	53
54	1	2	2	2	4	4	5	4	2	5	2	4	4	41
55	5	2	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3	4	43
56	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	50
57	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	47
58	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	42
59	5	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	47
60	5	4	3	3	4	4	4	4	4	2	3	3	3	46
61	5	3	3	4	5	3	3	3	3	3	3	3	4	45
62	5	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	47
63	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	45
64	4	3	3	3	5	4	3	3	4	3	3	4	3	45
65	5	5	3	3	5	4	4	3	2	5	3	2	4	48

66	3	4	3	4	3	3	3	3	3	5	3	2	4	43
67	5	4	4	4	3	3	2	3	4	5	4	3	2	46
68	5	2	4	2	5	4	3	5	4	5	4	3	2	48
69	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	5	3	44
70	4	2	3	4	3	3	3	2	3	4	3	5	3	42
71	3	2	3	2	2	2	4	4	3	4	3	5	2	39
72	2	3	2	3	2	2	2	4	4	4	2	4	2	36
73	2	2	3	2	3	3	2	4	4	4	3	3	3	38
74	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	51
75	5	5	4	4	4	4	5	5	3	3	4	3	3	52
76	5	2	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	44
77	5	1	2	2	2	4	2	5	2	2	2	4	2	35
78	5	5	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	48
79	3	3	2	2	2	4	5	5	2	2	2	2	3	37
80	5	4	5	2	2	3	3	3	5	2	5	3	2	44
81	4	4	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3	2	41
82	4	2	2	3	3	4	4	2	2	3	2	4	3	38
83	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	3	50
84	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	50
85	3	1	3	3	3	4	3	5	3	3	3	3	5	42
86	4	2	4	2	4	4	4	4	4	2	4	3	4	45
87	3	2	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	43
88	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	43
89	3	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	41
90	3	4	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	36

Kebijakan Desa (X₂)

no	X3						jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	4	3	3	4	2	4	20

2	3	3	3	3	4	3	19
3	4	4	4	5	4	5	26
4	4	4	3	4	4	4	23
5	4	5	4	4	3	3	23
6	3	3	5	4	4	4	23
7	4	4	4	4	4	3	23
8	3	4	3	3	4	3	20
9	3	4	3	3	4	4	21
10	3	4	4	3	3	3	20
11	4	4	4	3	4	4	23
12	4	4	3	4	4	3	22
13	4	4	3	4	3	3	21
14	4	5	4	4	4	5	26
15	4	4	4	4	3	3	22
16	4	5	5	4	4	4	26
17	3	4	4	3	4	4	22
18	3	4	4	4	2	3	20
19	5	4	5	5	4	3	26
20	5	4	4	5	4	3	25
21	4	2	5	4	4	3	22
22	3	5	4	3	5	5	25
23	3	5	4	4	5	5	26
24	4	4	5	4	3	4	24
25	4	4	4	4	4	4	24
26	5	5	4	5	5	4	28
27	5	5	4	5	5	4	28
28	4	5	5	5	4	5	28
29	4	5	5	4	5	5	28
30	5	5	3	4	5	5	27
31	3	3	3	4	4	3	20
32	3	3	3	3	3	3	18
33	4	4	4	4	5	4	25
34	3	4	3	3	3	3	19
35	3	4	4	4	3	3	21
36	5	5	5	4	4	4	27
37	3	3	3	3	4	4	20
38	4	5	5	5	4	5	28
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	4	3	3	4	4	22

41	3	3	4	4	4	4	22
42	4	3	3	4	4	3	21
43	3	2	4	3	3	4	19
44	3	3	3	3	3	3	18
45	3	3	3	3	3	3	18
46	3	4	4	4	3	3	21
47	5	4	3	4	3	4	23
48	4	4	4	4	3	4	23
49	4	4	4	4	4	4	24
50	2	2	2	2	3	3	14
51	4	4	4	4	4	5	25
52	4	5	4	4	4	3	24
53	3	3	3	3	3	5	20
54	4	3	2	3	3	5	20
55	5	5	5	5	4	4	28
56	5	5	5	5	4	4	28
57	5	5	5	5	4	4	28
58	3	4	3	3	4	4	21
59	3	3	3	4	3	4	20
60	4	4	5	4	3	2	22
61	3	4	3	3	3	3	19
62	4	4	4	4	5	4	25
63	3	3	3	3	3	3	18
64	3	3	3	4	4	3	20
65	5	4	5	4	5	5	28
66	4	4	3	4	5	5	25
67	4	5	5	5	4	5	28
68	5	5	5	5	5	5	30
69	5	5	5	5	5	4	29
70	4	4	4	4	4	4	24
71	5	5	5	4	4	4	27
72	3	3	3	4	3	4	20
73	3	4	3	3	4	4	21
74	4	4	4	4	4	4	24
75	5	5	5	5	5	4	29
76	4	4	3	5	4	3	23
77	3	3	4	4	3	4	21
78	3	4	4	4	4	4	23
79	3	3	3	3	4	3	19

80	4	4	4	5	4	5	26
81	4	4	3	4	4	4	23
82	4	5	4	4	3	3	23
83	3	3	5	4	4	4	23
84	4	4	4	4	4	3	23
85	3	4	3	3	4	3	20
86	3	4	3	3	4	4	21
87	3	4	4	3	3	3	20
88	4	4	4	3	4	4	23
89	4	4	3	4	4	3	22
90	4	4	3	4	3	3	21

Kelembagaan Desa (X₃)

no	X ₃						jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	4	3	3	4	2	4	20
2	3	3	3	3	4	3	19
3	4	4	4	5	4	5	26
4	4	4	3	4	4	4	23
5	4	5	4	4	3	3	23
6	3	3	5	4	4	4	23
7	4	4	4	4	4	3	23
8	3	4	3	3	4	3	20
9	3	4	3	3	4	4	21
10	3	4	4	3	3	3	20
11	4	4	4	3	4	4	23
12	4	4	3	4	4	3	22
13	4	4	3	4	3	3	21
14	4	5	4	4	4	5	26
15	4	4	4	4	3	3	22

16	4	5	5	4	4	4	26
17	3	4	4	3	4	4	22
18	3	4	4	4	2	3	20
19	5	4	5	5	4	3	26
20	5	4	4	5	4	3	25
21	4	2	5	4	4	3	22
22	3	5	4	3	5	5	25
23	3	5	4	4	5	5	26
24	4	4	5	4	3	4	24
25	4	4	4	4	4	4	24
26	5	5	4	5	5	4	28
27	5	5	4	5	5	4	28
28	4	5	5	5	4	5	28
29	4	5	5	4	5	5	28
30	5	5	3	4	5	5	27
31	3	3	3	4	4	3	20
32	3	3	3	3	3	3	18
33	4	4	4	4	5	4	25
34	3	4	3	3	3	3	19
35	3	4	4	4	3	3	21
36	5	5	5	4	4	4	27
37	3	3	3	3	4	4	20
38	4	5	5	5	4	5	28
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	4	3	3	4	4	22
41	3	3	4	4	4	4	22
42	4	3	3	4	4	3	21
43	3	2	4	3	3	4	19
44	3	3	3	3	3	3	18
45	3	3	3	3	3	3	18
46	3	4	4	4	3	3	21
47	5	4	3	4	3	4	23
48	4	4	4	4	3	4	23
49	4	4	4	4	4	4	24
50	2	2	2	2	3	3	14
51	4	4	4	4	4	5	25
52	4	5	4	4	4	3	24
53	3	3	3	3	3	5	20
54	4	3	2	3	3	5	20

55	5	5	5	5	4	4	28
56	5	5	5	5	4	4	28
57	5	5	5	5	4	4	28
58	3	4	3	3	4	4	21
59	3	3	3	4	3	4	20
60	4	4	5	4	3	2	22
61	3	4	3	3	3	3	19
62	4	4	4	4	5	4	25
63	3	3	3	3	3	3	18
64	3	3	3	4	4	3	20
65	5	4	5	4	5	5	28
66	4	4	3	4	5	5	25
67	4	5	5	5	4	5	28
68	5	5	5	5	5	5	30
69	5	5	5	5	5	4	29
70	4	4	4	4	4	4	24
71	5	5	5	4	4	4	27
72	3	3	3	4	3	4	20
73	3	4	3	3	4	4	21
74	4	4	4	4	4	4	24
75	5	5	5	5	5	4	29
76	4	4	3	5	4	3	23
77	3	3	4	4	3	4	21
78	3	4	4	4	4	4	23
79	3	3	3	3	4	3	19
80	4	4	4	5	4	5	26
81	4	4	3	4	4	4	23
82	4	5	4	4	3	3	23
83	3	3	5	4	4	4	23
84	4	4	4	4	4	3	23
85	3	4	3	3	4	3	20
86	3	4	3	3	4	4	21
87	3	4	4	3	3	3	20
88	4	4	4	3	4	4	23
89	4	4	3	4	4	3	22
90	4	4	3	4	3	3	21

Kesejahteraan Masyarakat (Y)

no	Y																	jumlah
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	
1	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	60
2	4	3	2	3	3	4	4	4	4	3	2	3	3	4	4	4	4	58
3	5	5	2	5	4	4	4	3	5	5	2	5	4	4	4	3	5	69
4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	64
5	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	60
6	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	66
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
8	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	64
9	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	47
10	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	55
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
12	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	64
13	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	2	3	51
14	2	2	4	3	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	2	48
15	5	3	4	3	4	4	4	3	5	3	4	3	4	4	4	3	5	65
16	5	3	4	5	4	3	4	3	5	3	4	5	4	3	4	3	5	67
17	4	3	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	68
18	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	64
19	4	4	2	2	4	3	3	3	4	4	2	2	4	3	3	3	4	54
20	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	71
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
22	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	66
23	3	3	2	2	4	4	3	4	3	3	2	2	4	4	3	4	3	53
24	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	64
25	5	3	3	3	5	3	4	3	5	3	3	3	5	3	4	3	5	63

26	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	75
27	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	75
28	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	73
29	4	5	4	3	5	5	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	4	76
30	5	5	4	5	5	4	3	5	5	5	4	5	5	4	3	5	5	77
31	5	2	2	3	3	3	4	3	5	2	2	3	3	3	4	3	5	55
32	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	56
33	5	4	3	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5	4	4	4	5	73
34	3	2	5	5	5	4	5	4	3	2	5	5	5	4	5	4	3	69
35	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	52
36	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	60
37	4	3	2	3	3	4	4	4	4	3	2	3	3	4	4	4	4	58
38	5	5	2	5	4	4	4	3	5	5	2	5	4	4	4	3	5	69
39	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	64
40	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	62
41	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	66
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
43	4	3	2	3	3	4	4	4	4	3	2	3	3	4	4	4	4	58
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
46	4	4	4	4	5	5	3	3	4	4	4	4	5	5	3	3	4	68
47	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	60
48	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	64
49	4	3	3	2	2	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	3	4	50
50	3	4	2	3	4	4	3	2	3	4	2	3	4	4	3	2	3	53
51	5	3	5	4	4	4	4	3	5	3	5	4	4	4	4	3	5	69
52	5	3	4	4	4	3	4	3	5	3	4	4	4	3	4	3	5	65
53	4	3	2	5	4	4	4	5	4	3	2	5	4	4	4	5	4	66
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
55	4	4	3	5	4	3	3	4	4	4	3	5	4	3	3	4	4	64
56	5	4	3	5	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4	4	4	5	71
57	5	4	4	3	4	4	5	3	5	4	4	3	4	4	5	3	5	69
58	5	5	4	5	5	3	3	4	5	5	4	5	5	3	3	4	5	73
59	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	57
60	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	64

61	3	2	5	5	5	4	5	4	3	2	5	5	5	4	5	4	3	69
62	5	4	3	5	5	4	4	4	5	4	3	5	5	4	4	4	5	73
63	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	56
64	5	2	2	3	3	3	4	3	5	2	2	3	3	3	4	3	5	55
65	5	5	4	5	5	4	3	5	5	5	4	5	5	4	3	5	5	77
66	4	5	4	3	5	5	5	5	4	5	4	3	5	5	5	5	4	76
67	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	73
68	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	75
69	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	75
70	5	3	3	3	5	3	4	3	5	3	3	3	5	3	4	3	5	63
71	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	60
72	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	57
73	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	64
74	3	4	5	4	5	5	5	4	3	4	5	4	5	5	5	4	3	73
75	5	4	3	5	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4	4	4	5	71
76	5	4	4	3	3	5	4	4	5	4	4	3	3	5	4	4	5	69
77	1	2	2	2	4	2	5	2	1	2	2	2	4	2	5	2	1	41
78	4	4	5	4	3	2	4	5	4	4	5	4	3	2	4	5	4	66
79	4	3	2	3	3	4	4	4	4	3	2	3	3	4	4	4	4	58
80	5	5	2	5	4	4	4	3	5	5	2	5	4	4	4	3	5	69
81	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	64
82	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	60
83	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	66
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	68
85	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	64
86	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	47
87	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	55
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51
89	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	64

LAMPIRAN 3
HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X₁)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	90	2,000	5,000	3,84444	,859986
X1.2	90	2,000	5,000	3,77778	,845049
X1.3	90	2,000	5,000	3,81111	,872739
X1.4	90	2,000	5,000	3,37778	,758143
X1.5	90	2,000	5,000	3,85556	,842163
X1.6	90	2,000	5,000	3,86667	,722045
X1.7	90	2,000	5,000	3,88889	,770881
X1.8	90	2,000	5,000	3,62222	,815272
X1.9	90	2,000	5,000	3,57778	,686594
X1.10	90	2,000	5,000	3,97778	,778616
X1.11	90	2,00	5,00	3,8111	,87274
X1.12	90	2,00	5,00	3,3778	,75814
X1.13	90	2,00	5,00	3,7778	,87124
X1.14	90	2,00	5,00	3,8222	,68002
X1.15	90	1,00	5,00	3,2778	,94842
X1.16	90	1,00	5,00	3,4778	,95079
X1.17	90	1,00	5,00	3,1889	,91054
X1.18	90	1,00	5,00	3,2889	,90249
Valid N (listwise)	90				

Kebijakan Desa (X₂)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	90	1,000	5,000	3,92222	,950787
X2.2	90	1,000	5,000	3,11111	,976631
X2.3	90	2,000	5,000	3,31111	,759131
X2.4	90	1,000	5,000	3,13333	,938562
X2.5	90	2,000	5,000	3,51111	,877233
X2.6	90	2,000	5,000	3,65556	,564116
X2.7	90	1,000	5,000	3,40000	,933761
X2.8	90	1,000	5,000	3,40000	,992104

X2.9	90	2,000	5,000	3,44444	,780537
X2.10	90	2,000	5,000	3,56667	,912461
X2.11	90	2,000	5,000	3,31111	,759131
X2.12	90	1,000	5,000	3,14444	,881280
X2.13	90	1,000	5,000	3,01111	,827809
Valid N (listwise)	90				

Kelembagaan Desa (X₃)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	90	2,000	5,000	3,76667	,735153
X3.2	90	2,000	5,000	3,96667	,770962
X3.3	90	2,000	5,000	3,81111	,805800
X3.4	90	2,000	5,000	3,87778	,700366
X3.5	90	2,000	5,000	3,81111	,701434
X3.6	90	2,000	5,000	3,78889	,741914
Valid N (listwise)	90				

Kesejahteraan Masyarakat (Y)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	90	1,000	5,000	4,05556	,798328
Y.2	90	2,000	5,000	3,62222	,743175
Y.3	90	2,000	5,000	3,30000	,866998
Y.4	90	2,000	5,000	3,76667	,887491
Y.5	90	2,000	5,000	3,80000	,752524
Y.6	90	2,000	5,000	3,67778	,614941
Y.7	90	3,000	5,000	3,74444	,591344
Y.8	90	2,000	5,000	3,60000	,699920
Y.9	90	1,000	5,000	4,05556	,798328
Y.10	90	2,000	5,000	3,62222	,743175
Y.11	90	2,000	5,000	3,30000	,866998
Y.12	90	2,000	5,000	3,76667	,887491
Y.13	90	2,000	5,000	3,80000	,752524
Y.14	90	2,000	5,000	3,67778	,614941
Y.15	90	3,000	5,000	3,74444	,591344
Y.16	90	2,000	5,000	3,60000	,699920
Y.17	90	1,000	5,000	4,05556	,798328

Correlations

[illegible]

X1.5	Pearson Correlation	-.202	-.109	-.007	.368*	1	.153	.183	.083	.243	.252	-.007	.368*	.109	.014	-.076	-.053	-.037	.056	.426**
	Sig. (2-tailed)	.056	.308	.948	.000		.151	.085	.431	.021	.017	.948	.000	.309	.879	.478	.619	.727	.603	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.6	Pearson Correlation	-.070	.061	.049	.196	.113		.215	.257	.112	.055	.049	.196	.229	.249	.088	-.004	.244	.129	.425**
	Sig. (2-tailed)	.512	.565	.648	.065	.111		.042	.044	.299	.609	.648	.065	.256	.018	.422	.967	.021	.227	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.7	Pearson Correlation	.008	.238	.469	.073	.123	.215		.290	.103	.033	.469	.073	.263	.063	.283	.166	.135	.366	.580**
	Sig. (2-tailed)	.944	.024	.000	.496	.085	.042		.006	.341	.756	.000	.496	.504	.957	.119	.200	.000	.066	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.8	Pearson Correlation	.043	.170	.230	.215	.083	.257	.220		.033	.019	.230	.215	.033	.009	.200	.094	.017	.064	.504**
	Sig. (2-tailed)	.684	.108	.029	.042	.435	.046	.044		.904	.648	.029	.042	.500	.930	.300	.396	.511	.550	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.9	Pearson Correlation	.111	.144	.247	.146	.243	.110	.103	.013		.234	.247	.146	.100	.147	.040	.037	.123	.073	.250**
	Sig. (2-tailed)	.291	.175	.009	.278	.021	.294	.944	.026		.029	.019	.278	.653	.100	.929	.728	.250	.459	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.10	Pearson Correlation	.028	-.076	-.105	.186	.252	.055	.033	-.049	.234	1	-.005	.186	-.040	.162	-.174	-.198	-.057	-.007	.330**

X1.16	Pearson Correlation	-.018	.022	.178	-.144	-.053	-.004	.135	.091	.037	-.119	.178	-.144	.143	.063	.698*	1	.375*	.296*	.244
	Sig. (2-tailed)	.866	.839	.075	.619	.907	.267	.306	.728	.061	.097	.175	.148	.583	.000			.000	.005	.897
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.17	Pearson Correlation	-.019	.128	.187	.009	-.043	.264*	.306	.067	-.021	-.085	.179	.005	.182	.147	.477*	.35*	.507	.562*	.171
	Sig. (2-tailed)	.856	.229	.078	.970	.221	.001	.351	.290	.591	.078	.173	.606	.066	.000	.000		.000	.000	.107
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X1.18	Pearson Correlation	-.043	.188	.284*	-.116	.059	.136*	.306	.067	-.021	-.085	.179	.005	.182	.147	.477*	.35*	.507	.562*	.271
	Sig. (2-tailed)	.689	.076	.007	.233	.607	.200	.351	.290	.591	.078	.173	.606	.066	.000	.000		.000	.000	.107
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Pearson Correlation	.416*	.529*	.577*	.422*	.456*	.500*	.544*	.250	.336	.567*	.455*	.068	.285*	.209	.858*	.044	.171	.177	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.018	.000	.000	.000	.508	.006	.079	.877	.097	.177	.177	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kebijakan Desa (X₂)

Correlations

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2.11	X2.12	X2.13	Kebijakan Desa
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------------

X2.1	Pearson Correlation	1	,227 _*	,392 _{**}	,163	,142	,075	,048	- ,014	,153	,038	,392 _{**}	,054	- ,085	,454 _{**}
	Sig. (2-tailed)		,031	,000	,125	,180	,481	,653	,894	,150	,719	,000	,615	,428	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X2.2	Pearson Correlation	,227 _*	1	,271 _{**}	,118	,051	,070	- ,012	- ,244 _*	,185	- ,021	,271 _{**}	- ,084	- ,168	,294 _{**}
	Sig. (2-tailed)	,031		,010	,266	,633	,511	,908	,021	,081	,844	,010	,430	,113	,005
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X2.3	Pearson Correlation	,392 _{**}	,271 _{**}	1	,430 _{**}	,147	- ,009	,235	,027	,409 _{**}	,229 _*	1,000	,050	,155	,732 _{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,010		,000	,168	,930	,026	,802	,000	,030	0,000	,642	,144	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X2.4	Pearson Correlation	,163	,118	,430 _{**}	1	,135	,088	,259	,087	,072	,449 _{**}	,430 _{**}	,153	,215	,632 _{**}
	Sig. (2-tailed)	,125	,266	,000		,206	,411	,014	,416	,503	,000	,000	,150	,042	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X2.5	Pearson Correlation	,142	,051	,147	,135	1	,382 _{**}	,063	- ,044	,222 _*	,308 _{**}	,147	- ,169	,224 _*	,430 _{**}
	Sig. (2-tailed)	,180	,633	,168	,206		,000	,555	,681	,035	,003	,168	,111	,034	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X2.6	Pearson Correlation	,075	,070	- ,009	,088	,382 _{**}	1	,094	,189	- ,031	- ,009	- ,009	- ,125	,225 _*	,288 _{**}
	Sig. (2-tailed)	,481	,511	,930	,411	,000		,379	,075	,770	,929	,930	,241	,033	,006
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X2.7	Pearson Correlation	,048	- ,012	,235 _*	,259 _*	,063	,094	1	,408 _{**}	,000	- ,045	,235 _*	,107	,503 _{**}	,514 _{**}
	Sig. (2-tailed)	,653	,908	,026	,014	,555	,379		,000	1,000	,675	,026	,318	,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X2.8	Pearson Correlation	- ,014	- ,244 _*	,027	,087	- ,044	,189	,408	1	- ,015	- ,129	,027	,049	,296 _{**}	,296 _{**}
	Sig. (2-tailed)	,894	,021	,802	,416	,681	,075	,000		,892	,225	,802	,648	,005	,005
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
X2.9	Pearson Correlation	,153	,185	,409 _{**}	,072	,222 _*	- ,031	,000	- ,015	1	,100	,409 _{**}	,020	- ,008	,415 _{**}

X2.10	Sig. (2-tailed)	,150	,081	,000	,503	,035	,770	1,000	,892		,349	,000	,852	,942	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Pearson Correlation	,038	-,021	,229	,449**	,308**	-,009	-,045	-,129	,100	1	,229	,107	-,008	,395**
X2.11	Sig. (2-tailed)	,719	,844	,030	,000	,003	,929	,675	,225	,349		,030	,317	,937	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Pearson Correlation	,392**	,271**	1,000	,430**	,147	-,009	,235	,027	,409**	,229	1	,050	,155	,732**
X2.12	Sig. (2-tailed)	,000	,010	0,000	,000	,168	,930	,026	,802	,000	,030		,642	,144	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Pearson Correlation	,054	-,084	,050	,153	-,169	-,125	,107	,049	,020	,107	,050	1	-,033	,290*
X2.13	Sig. (2-tailed)	,615	,430	,642	,150	,111	,241	,318	,648	,852	,317	,642		,757	,038
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Pearson Correlation	-,085	-,168	,155	,215	,224	,225	,503	,296**	-,008	-,008	,155	-,033	1	,416**
Kebijakan Desa	Sig. (2-tailed)	,428	,113	,144	,042	,034	,033	,000	,005	,942	,937	,144	,757		,000
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Pearson Correlation	,454**	,294**	,732**	,632**	,430**	,288**	,514**	,296**	,415**	,395**	,732**	,219	,416**	1
N	Sig. (2-tailed)	,000	,005	,000	,000	,000	,006	,000	,005	,000	,000	,000	,038	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kelembagaan Desa (X₃)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Kelembagaan Desa
X3.1	Pearson Correlation	1	,601	,494	,708	,415	,259	,797
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,014	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90

X3.2	Pearson Correlation	,601**	1	,496**	,513**	,445**	,322**	,780**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,002	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
X3.3	Pearson Correlation	,494**	,496**	1	,596**	,314**	,252*	,735**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,003	,017	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
X3.4	Pearson Correlation	,708**	,513**	,596**	1	,341**	,253*	,780**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,001	,016	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
X3.5	Pearson Correlation	,415**	,445**	,314**	,341**	1	,462**	,676**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,003	,001		,000	,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
X3.6	Pearson Correlation	,259*	,322**	,252*	,253*	,462**	1	,583**
	Sig. (2-tailed)	,014	,002	,017	,016	,000		,000
	N	90	90	90	90	90	90	90
Kelembagaan Desa	Pearson Correlation	,797**	,780**	,735**	,780**	,676**	,583**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y.16	Y.17	Kesejahteraan Masyarakat
Y.1	Pearson Correlation	1	,471**	,122	,478**	,337**	,289**	,221*	,282**	1,000	,471**	,122	,478**	,337**	,289**	,221*	,282**	1,000	,698**
	Sig. (2-tailed)		,000	,253	,000	,001	,006	,036	,007	0,000	,000	,253	,000	,001	,006	,036	,007	0,000	,000

Y.2	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Pears on Correl ation	,471 _{..}	1	,108	,376 _{..}	,366 _{..}	,394 _{..}	,034	,333 _{..}	,471 _{..}	1,00 ₀	,108	,376 _{..}	,366 _{..}	,394 _{..}	,034	,333 _{..}	,471 _{..}	,616 _{..}
	Sig. (2-tailed)	,000		,310	,000	,000	,000	,754	,001	,000	0,00 ₀	,310	,000	,000	,000	,754	,001	,000	,000
Y.3	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Pears on Correl ation	,122	,108	1	,428 _{..}	,369 _{..}	,225 _{..}	,261 _{..}	,311 _{..}	,122	,108	1,00 ₀	,428 _{..}	,369 _{..}	,225 _{..}	,261 _{..}	,311 _{..}	,122	,556 _{..}
	Sig. (2-tailed)	,253	,310		,000	,000	,033	,013	,003	,253	,310	0,00 ₀	,000	,000	,033	,013	,003	,253	,000
Y.4	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Pears on Correl ation	,478 _{..}	,376 _{..}	,428 _{..}	1	,501 _{..}	,231 _{..}	,185	,300 _{..}	,478 _{..}	,376 _{..}	,428 _{..}	1,00 ₀	,501 _{..}	,231 _{..}	,185	,300 _{..}	,478 _{..}	,725 _{..}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,028	,081	,004	,000	,000	,000	0,00 ₀	,000	,028	,081	,004	,000	,000
Y.5	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Pears on Correl ation	,337 _{..}	,366 _{..}	,369 _{..}	,501 _{..}	1	,369 _{..}	,338 _{..}	,294 _{..}	,337 _{..}	,366 _{..}	,369 _{..}	,501 _{..}	1,00 ₀	,369 _{..}	,338 _{..}	,294 _{..}	,337 _{..}	,695 _{..}
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000		,000	,001	,005	,001	,000	,000	,000	0,00 ₀	,000	,001	,005	,001	,000
Y.6	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Pears on Correl ation	,289 _{..}	,394 _{..}	,225 _{..}	,231 _{..}	,369 _{..}	1	,451 _{..}	,506 _{..}	,289 _{..}	,394 _{..}	,225 _{..}	,231 _{..}	,369 _{..}	1,00 ₀	,451 _{..}	,506 _{..}	,289 _{..}	,628 _{..}
	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,033	,028	,000		,000	,000	,006	,000	,033	,028	,000	0,00 ₀	,000	,000	,006	,000
Y.7	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Pears on Correl ation	,221 _{..}	,034	,261 _{..}	,185	,338 _{..}	,451 _{..}	1	,347 _{..}	,221 _{..}	,261 _{..}	,185	,338 _{..}	,451 _{..}	1,00 ₀	,347 _{..}	,221 _{..}	,261 _{..}	,503 _{..}
	Sig. (2-tailed)	,036	,754	,013	,081	,001	,000		,001	,036	,754	,013	,081	,001	0,00 ₀	,001	,036	,013	,000
Y.8	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Pears on Correl ation	,282 _{..}	,333 _{..}	,311 _{..}	,300 _{..}	,294 _{..}	,506 _{..}	,347 _{..}	1	,282 _{..}	,333 _{..}	,311 _{..}	,300 _{..}	,294 _{..}	,506 _{..}	,347 _{..}	1,00 ₀	,282 _{..}	,629 _{..}
	Sig. (2-tailed)	,007	,001	,003	,004	,005	,000	,001		,007	,001	,003	,004	,005	,000	,001	,007	,001	,000
Y.9	N	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	Pears on Correl ation	,221 _{..}	,034	,261 _{..}	,185	,338 _{..}	,451 _{..}	1	,347 _{..}	,221 _{..}	,261 _{..}	,185	,338 _{..}	,451 _{..}	1,00 ₀	,347 _{..}	,221 _{..}	,261 _{..}	,503 _{..}
	Sig. (2-tailed)	,036	,754	,013	,081	,001	,000		,001	,036	,754	,013	,081	,001	0,00 ₀	,001	,036	,013	,000

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	61,77778	34,175	,165	,701
X1.2	61,84444	32,740	,323	,684
X1.3	61,81111	30,717	,527	,661
X1.4	62,24444	33,737	,257	,691
X1.5	61,76667	34,248	,164	,701

X1.6	61,75556	33,513	,304	,687
X1.7	61,73333	31,366	,534	,664
X1.8	62,00000	33,506	,255	,692
X1.9	62,04444	35,953	,018	,711
X1.10	61,64444	35,782	,020	,713
X1.11	61,81111	30,717	,527	,661
X1.12	62,24444	33,737	,257	,691
X1.13	61,84444	34,672	,111	,707
X1.14	61,80000	33,847	,286	,689
X1.15	62,34444	32,161	,327	,684
X1.16	62,14444	32,754	,268	,691
X1.17	62,43333	31,731	,391	,676
X1.18	62,33333	32,202	,347	,681

KEBIJAKAN DESA (X₂)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,654	13

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	40,00000	21,213	,282	,637
X2.2	40,81111	22,694	,101	,669
X2.3	40,61111	19,656	,647	,582
X2.4	40,78889	19,584	,496	,597
X2.5	40,41111	21,616	,270	,638
X2.6	40,26667	23,299	,179	,650
X2.7	40,52222	20,702	,355	,624
X2.8	40,52222	22,657	,100	,669
X2.9	40,47778	21,983	,273	,638
X2.10	40,35556	21,850	,224	,646
X2.11	40,61111	19,656	,647	,582
X2.12	40,77778	23,456	,042	,674
X2.13	40,91111	21,857	,264	,639

KELEMBAGAAN DESA (X₃)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,819	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	19,25556	7,204	,685	,768
X3.2	19,05556	7,154	,655	,774
X3.3	19,21111	7,270	,582	,791
X3.4	19,14444	7,406	,670	,773
X3.5	19,21111	7,876	,528	,802
X3.6	19,23333	8,203	,399	,828

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,907	17

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	59,13333	57,712	,642	,900
Y.2	59,56667	59,237	,554	,903
Y.3	59,88889	59,044	,476	,906
Y.4	59,42222	56,449	,667	,899
Y.5	59,38889	58,195	,642	,900
Y.6	59,51111	60,230	,579	,902
Y.7	59,44444	61,643	,446	,906
Y.8	59,58889	59,458	,573	,902
Y.9	59,13333	57,712	,642	,900
Y.10	59,56667	59,237	,554	,903
Y.11	59,88889	59,044	,476	,906
Y.12	59,42222	56,449	,667	,899
Y.13	59,38889	58,195	,642	,900
Y.14	59,51111	60,230	,579	,902

Y.15	59,44444	61,643	,446	,906
Y.16	59,58889	59,458	,573	,902
Y.17	59,13333	57,712	,642	,900

LAMPIRAN 6

HASIL UJI HIPOTESIS

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,646 ^a	,417	,397	6,314260	2,049

a. Predictors: (Constant), Kelembagaan Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kebijakan Desa

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2456,979	3	818,993	20,542	,000 ^b
	Residual	3428,810	86	39,870		
	Total	5885,789	89			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Kelembagaan Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kebijakan Desa

LAMPIRAN 7**Distribusi t untuk df = 1 – 100**

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903

39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663

80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526
----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	3,237	8,296		,390	,697			
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	,596	,199	,263	2,994	,004	,440	,307	,
Kebijakan Desa	,350	,149	,213	2,352	,021	,434	,246	,
Kelembagaan Desa	,964	,230	,383	4,188	,000	,546	,412	,

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

BIODATA

Identitas Diri

Nama : **Julinda sari**
Tempat/Tanggal Lahir : 19 Juli 1998
Alamat Lengkap : Dusun Harapan Jaya Banjar Benai
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Telp/Wa : 0821-6941-5394
Alamat *E-mail* : Juliandasari393@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : 1. SD N 10 Talontam Benai
2. SMP N 09 Benai
3. SMA N 1 Benai
4. S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi (2016-2020)

Demikian Biodata ini dibuat dengan Sebenar-benarnya.

Teluk Kuantan, 22 Agustus 2020

Julinda sari
160412024